

LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS PENGARUH KINERJA ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI TERHADAP KEBERHASILAN USAHA KOPERASI UNIT DESA (Survey Pada KUD Di Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu)

Oleh :

**Muhamad Sil, SE. S.Pd, M.Si
Drs. H. Ismail**

**UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH
UNIVERSITAS TERBUKA
BENGKULU
2002**

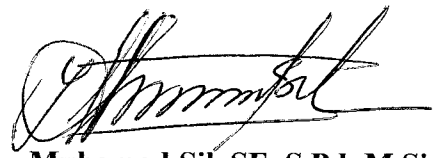
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS TERBUKA**

L A P O R A N P E N E L I T I A N

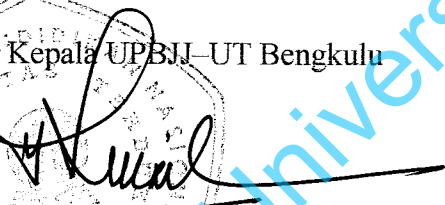
1. JUDUL	:	ANALISIS PENGARUH KINERJA ALAT PER- LENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI TER- HADAP KEBERHASILAN USAHA KOPERASI UNIT DESA (Survey Pada KUD di Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu)
2. PENELITI UTAMA		
a. Nama Lengkap	:	Muhamad Sil, SE, S.Pd, M.Si
b. N I P	:	131856319
c. Pangkat	:	Penata / IIIc
d. Jabatan	:	Lektor
e. Fakultas/Jurusan	:	FEKON – UT
f. Unit Kerja	:	UPBJJ-UT BENGKULU
3. JUMLAH TIM PENELITI	:	2 (dua) orang
4. PELAKSANAAN	:	10 (sepuluh) bulan
a. Jangka Waktu Penelitian		
Mulai	:	
b. Tempat Penelitian	:	Kabupaten Bengkulu Utara Prop. Bengkulu
5. BIAYA	:	Rp. 3.920.000,- (Tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Bengkulu , Februari 2002

Ketua Peneliti,


Muhamad Sil, SE, S.Pd, M.Si
NIP. 131856319

Kepala UPBJJ-UT Bengkulu



Drs. H. Ismail
NIP. 131283424

Menyetujui,

Kepala Lembaga Penelitian
Universitas Terbuka

Dr. WBP. Simanjuntak
NIP. 130212017

Ketua Pusat Studi Indonesia
Lemlit Universitas Terbuka


Dr. Tian Belawati, M.Ed
NIP. 131569974

Analisis Pengaruh Kinerja Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Unit Desa (Survey Pada KUD di Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti pengaruh kinerja alat perlengkapan organisasi koperasi yaitu rapat anggota, pengurus dan pengawas terhadap keberhasilan KUD di Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.

Populasi penelitian ini adalah 45 KUD pada 11 kecamatan dari 12 kecamatan dengan klasifikasi sudah KUD Mandiri di Kabupaten Bengkulu Utara. Sampel penelitian diambil 23 KUD dengan teknik random sampling dan area sampling secara proporsional di setiap kecamatan. Hal ini dilakukan atas dasar berbagai pertimbangan praktis operasional.

Alat pengumpul data yang digunakan adalah seperangkat angket, wawancara dan observasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi pengurus dan pengawas di setiap KUD sampel. Data dianalisis secara diskriptif kuantitatif untuk melihat pengaruh kinerja alat perlengkapan organisasi koperasi terhadap keberhasilan usaha KUD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecilnya pengaruh kinerja alat perlengkapan organisasi yaitu komponen Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas terhadap keberhasilan KUD.

Di samping itu keberhasilan usaha KUD yang diukur dari persentase perkembangannya dari tahun 1998 dan 1999 memperlihatkan perkembangan yang rendah. Baik ditinjau dari volume usaha, perputaran modal, ratio rentabilitas ekonomis dan rentabilitas modal sendiri serta profit margin. Ini memperlihatkan bahwa kurang berfungsinya secara optimal alat perlengkapan organisasi koperasi sehingga kurang mendukung keberhasilan KUD di Kabupaten Bengkulu Utara.

Pengurus dan pengawas KUD di Kabupaten Bengkulu Utara, maka disarankan perlunya meningkatkan kemampuan melaksanakan fungsi dan peran serta optimal serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kinerja dengan cara pelatihan baik yang bersifat *Off the job training* maupun *On the job training*.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa, penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Unit Desa (Survey pada KUD di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu) telah berhasil diselesaikan dengan baik.

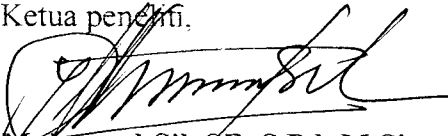
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. WBP. Simanjuntak, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Terbuka.
2. Ibu Dr. Tian Belawati, Kepala Pusat Studi Indonesia pada Lembaga Penelitian Universitas Terbuka.
3. Bapak Drs. H. Ismail, Kepala UPBJJ-UT Bengkulu sekaligus sebagai anggota peneliti.
4. Kakandepkop Kabupaten Bengkulu Utara yang telah memberikan data sekunder tentang KUD.
5. Sdr. Beni Rasdiwansyah, S.Pd dkk sebagai tenaga teknis dalam penelitian ini dan semua pihak yang telah membantu mengumpulkan data.
6. Pengurus, anggota dan pengawas KUD se-Kabupaten Bengkulu Utara yang memberikan data dalam penelitian ini.

Akhirnya diharapkan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi insan perkoperasian di Kabupaten Bengkulu khususnya dan Provinsi Bengkulu pada umumnya.

Bengkulu, Februari 2002

Ketua peneliti,


Muhammad Sil, SE, S.Pd, M.Si
 NIP. 131856319

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Hasil Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Pustaka	10
2.2. Hipotesis	19
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian yang Digunakan	20
3.2. Struktur Penelitian	20
3.3. Strategi Penelitian	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN	
4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	33
4.2. Perkembangan Usaha dan Analisis Ratio Keuangan KUD	38
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	45
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Indikator dan Pembobotan Variabel -----	28
4.1. Tata guna Lahan di Kabupaten Bengkulu Utara -----	33
4.2. Keadaan Penduduk dalam kelompok Umur dan Jenis Kelamin -----	35
4.3. Koperasi di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 1999 -----	36
4.4. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rapat Anggota KUD Sampel di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000 -----	46
4.5. Keputusan Rapat Anggota Sesuai Dengan Kebutuhan Anggota KUD Sampel di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000 ---	47
4.6. Tingkat Pendidikan Pengurus KUD Sampel di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000 -----	48
4.7. Pengurus KUD Sampel yang Pernah Mengikuti Pelatihan Tentang Perkoperasian Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000 -----	49
4.8. Pengalaman Kerja Sebagai Pengurus KUD Sampel di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000 -----	50
4.9. Tingkat Pemahaman Terhadap Tugas Dan Kewajiban Sebagai Pengurus KUD Sampel di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000 -----	51
4.10. Tingkat Pendidikan Formal Pengawas KUD Sampel di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000 -----	52
4.11. Tingkat Pelatihan Perkoperasian Yang Pernah Diikuti Pengawas KUD Sampel di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000 -----	54
4.12. Pengetahuan Pengawas KUD Sampel Tentang Administrasi Pembukuan KUD di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000 -----	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Sampel KUD, Kecamatan, Alamat, Tahun, Badan Hukum Pengurus KUD di Kabupaten Bengkulu Utara 1999
2. Keadaan Modal KUD Sampel di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 1998 – 1999.
3. Keadaan Volume Usaha Bersih KUD Sampel di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 1998 – 1999.
4. Keadaan Kemampuan Usaha Dalam Rentabilitas Ekonomis (RE) dan Rentabilitas Modal Sendiri (RMS) KUD Sampel di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 1998 – 1999.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya di dalam penjelasannya dikemukakan antara lain bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan sesuai dengan itu adalah koperasi. Dalam hubungan ini koperasi sangat penting guna menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Guna melaksanakan amanat konstitusi yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 33 tersebut, maka selanjutnya oleh para wakil rakyat dan pemerintah dalam GBHN 1999 telah dirumuskan kebijakan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif maju dan berdaya saing berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Tujuan pembinaan dan pengembangan koperasi adalah terwujudnya koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan lembaga ekonomi yang berdaya saing tinggi, tangguh, dan mandiri.

Harapan terhadap koperasi sebagaimana dikemukakan di atas sungguh beralasan, karena koperasi sesungguhnya memiliki cakupan multi dimensi yang bersifat strategis terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Hal tersebut karena koperasi merupakan suatu sistem normatif, karena koperasi adalah manifestasi asas kekeluargaan dan kegotong-royongan yang diwujudkan melalui mekanisme "dari oleh dan untuk anggotanya" yang merupakan aktualisasi dari pranata sosial budaya masyarakat Indonesia itu sendiri.

Koperasi juga merupakan sistem pendidikan bagi para anggotanya, peningkatan swadaya dan peningkatan partisipasi tidak terlepas dari kegiatan penyuluhan baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek sosial. Koperasi sebagai badan usaha atau organisasi ekonomi yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi ekonomipun selalu berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan swadaya dan peningkatan solidaritas sosial ke arah partisipasi sosial bagi anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

Peranan koperasi yang sangat penting adalah sebagai organisasi kekuatan, manakala semangat berkoperasi telah benar-benar hidup di tengah masyarakat, maka koperasi dapat menjadi organisasi kekuatan yang besar di tinjau dari segi politik, sosial budaya dan ketahanan nasional. Hal tersebut tercermin dalam prinsip koperasi yang antara lain terbuka dan sularela, prinsip tersebut mencerminkan bahwa untuk menjadi anggota koperasi tidak terbatas pada golongan tertentu, aliran politik tertentu, pemeluk agama

tertentu atau suku bangsa tertentu, tetapi koperasi justru berperan menghimpun masyarakat yang beraneka ragam tersebut. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia yang masyarakatnya sangat heterogen, maka bangun badan usaha koperasilah yang sangat tepat.

Menyadari akan pentingnya peranan koperasi, maka pertumbuhan dan perkembangannya mutal perlu ditingkatkan. Berbagai upaya serta terobosan yang dilakukan oleh gerakan koperasi itu sendiri maupun oleh pemerintah mulai tahap officialisasi hingga sampai pada tahap mandiri (otonom).

Sebagai wujud nyata kesungguhan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasi terutama di daerah pedesaan, dimana sebagian besar penduduk Indonesia berada. Pemerintah mengeluarkan Inpres 4 tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan KUD. Selanjutnya Inpres tersebut di revisi atau di ganti dengan Inpres Nomor 18 tahun 1998, arah yang ingin dicapai yaitu dalam rangka peningkatan, pembinaan dan pengembangan perkoperasian dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan mendorong pertumbuhan kegiatan perkoperasian rakyat, oleh karenanya dipandang perlu untuk memacu pemerataan dan perluasan pengembangan perkoperasian.

Kemajuan pembangunan koperasi/KUD sesungguhnya sangat tergantung dari partisipasi aktif seluruh instansi terkait dan partisipasi unsur internal koperasi seperti pengurus, pengawas, manajer serta partisipasi seluruh anggotanya.

Di bidang koperasi, perkembangan KUD di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 1995 sampai dengan 1998, mengalami penurunan dari 85 KUD hanya tinggal 45 KUD atau turun sebesar 47,06 persen.

Fluktuasi perkembangan KUD di Kabupaten Bengkulu Utara tersebut di atas tidak memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk lebih meningkatkan peranan koperasi dalam sistem perekonomian nasional. Sebagaimana yang ditegaskan dalam TAP MPR RI No. XVI tahun 1998, pasal 5 berbunyi, koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai nilai utama pembangunan ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan, dorongan, dukungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai pemihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN.

Peningkatan volume usaha dan jumlah SHU dalam suatu koperasi seyogianya disebabkan karena berjalan secara harmonis mekanisme manajemen organisasi maupun usaha dalam kehidupan koperasi, yang ditandai oleh berfungsinya secara benar Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi, dimana seluruh anggota ikut berpartisipasi dalam merumuskan arah dan tujuan serta program koperasi.

Pengurus sebagai pemegang Rapat Anggota telah melaksanakan peran dan fungsi secara baik dan benar dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi, pengawas telah menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya organisasi dan usaha koperasi sesuai keputusan Rapat Anggota, serta seluruh

anggota berpartisipasi secara aktif memanfaatkan pelayanan yang disediakan oleh koperasi baik bidang usaha maupun partisipasi dalam bidang permodalan.

Perkembangan pembangunan KUD yang ditunjukkan melalui meningkatnya jumlah unit KUD dan bertambahnya jumlah anggota yang terdaftar, meningkatnya jumlah modal, jumlah asset, volume usaha dan jumlah SHU diharapkan diikuti dengan perkembangan kualitas baik organisasi maupun usaha KUD yang dicerminkan dengan meningkatnya kesejahteraan anggota KUD itu sendiri.

Selain itu KUD diharapkan dapat menjadi media bagi peningkatan kegiatan ekonomi, dalam hal ini adalah anggota, karena itu KUD harus berhasil dalam segala aspek, baik aspek ekonomi maupun aspek sosial. Kepercayaan anggota terhadap pengurus merupakan hasil pengamatan dan penilaian terhadap pengurus, baik dilihat dari tingkat pendidikan, kemampuan, keterampilan, pengalaman kerja serta kejujuran. Sikap rasa memiliki oleh para anggota baik berupa tanggung jawab untuk berpartisipasi maupun dalam memanfaatkan pelayanan KUD merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dan kesinambungan kehidupan koperasi/KUD.

Menghadapi kemajuan ekonomi dan pembangunan serta kemajuan IPTEK yang sangat pesat dan mengglobalisasi, maka koperasi ditantang untuk menunjukkan jati dirinya dan kemampuannya dalam persaingan ekonomi yang sangat kuat dari badan usaha lainnya seperti swasta dan BUMN, untuk itu koperasi harus dikelola secara modern dan profesional.

Dewasa ini perkembangan kelembagaan KUD cukup meningkat, namun realita yang kita hadapi ternyata kehidupan koperasi masih dihadapkan pada berbagai macam persoalan antara lain :

1. "Departemen Koperasi (1992 : 120), dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara dan Swasta, koperasi tertinggal jauh dalam kehidupan perekonomian nasional. Organisasi, modal, kemampuan manajemen dan lain-lain yang diperlukan koperasi sebagai kekuatan ekonomi masih banyak yang harus dibenahi".
2. "Muslimin Nasution (1987 : 18) dari segi personel pengelola koperasi ternyata sangat lemah sekali, baik pengurus maupun badan pengawas yang bersumber dari anggota disamping rendahnya kemampuan profesionalnya. Latihan-latihan yang diberikan lebih menekankan pada manajemen umum dan kurang mengembangkan spesialisasi yang sangat menentukan profesionalisme koperasi".
3. Berdasarkan keputusan Rapat Anggota DEKOPIN tahun 1999 di Jakarta, telah dirumuskan permasalahan internal yang masih dialami oleh Gerakan Koperasi Indonesia, yaitu :
 - a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya kualitas kesadaran anggota tentang perkoperasian dan berkoperasi, pengelolaan koperasi sebagian besar oleh orang yang bukan ahlinya, serta pendidikan perkoperasian yang belum memadai.
 - b. Manajemen organisasi koperasi belum dilaksanakan sesuai dengan kaidah manajemen profesional, yang disebabkan oleh kualitas pengelola, dan masih adanya intervensi pihak luar dalam pengelolaan koperasi.
 - c. Usaha yang dilakukan koperasi belum mampu menunjukkan keunggulan komparatif.
 - d. Hubungan kelembagaan vertikal koperasi primer-sekunder belum berjalan sesuai dengan prinsip koperasi, sehingga mengakibatkan usaha-usaha yang dilakukan koperasi sekunder bukan cerminan kebutuhan dari koperasi primernya.
 - e. Kerjasama antara koperasi belum dilakukan secara efektif dan terimplentasi dalam suatu simpul organisasi jaringan usaha koperasi.
 - f. Kurang akses dalam penerapan teknologi yang mampu mendorong efisiensi koperasi.
 - g. Lemahnya partisipasi anggota dalam permodalan koperasi, yang disebabkan fungsi simpanan anggota dalam koperasi belum dilaksanakan secara benar dan pola pemupukan modal belum dapat berlangsung secara efektif

Fenomena yang telah dikemukakan di atas, yaitu lemahnya kemampuan pengurus dan pengawas merupakan permasalahan yang besar pengaruhnya terhadap kualitas perkembangan atau keberhasilan koperasi/KUD baik dari segi organisasi maupun dari segi usaha.

Keberhasilan usaha KUD salah satu dipengaruhi oleh Alat Perlengkapan Organisasi (APOK) yaitu : Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas, permasalahan itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang :

"Analisis Pengaruh Kinerja Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Unit Desa".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang diuraikan dalam latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kinerja Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi yaitu : Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas terhadap keberhasilan usaha KUD di Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu.
2. Apakah pengaruh Kinerja Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas sama kuatnya atau tidak jauh berbeda terhadap keberhasilan usaha KUD di Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi terhadap keberhasilan usaha KUD di Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu. Berdasarkan maksud tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kinerja Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi yaitu Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas terhadap keberhasilan usaha KUD di Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui kuatnya pengaruh Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas terhadap keberhasilan usaha KUD di Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aspek praktis dan aspek teoritis yang diformulasikan sebagai berikut :

1. Aspek praktis diharapkan bermanfaat dalam rangka pengembangan koperasi secara langsung di lapangan yaitu sebagai bahan umpan balik bagi pelaksanaan Rapat Anggota, pelaksanaan tugas Pengurus dan Pengawas dalam pengelolaan usaha KUD, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola usaha.

2. Aspek teoritis, diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangan terhadap pengembangan pengetahuan dalam ilmu koperasi, yaitu dengan terungkapnya Pengaruh Kinerja Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi terhadap keberhasilan usaha KUD.
3. Sebagai bahan masukan, yaitu dengan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat keputusan/kebijakan dalam kaitannya dengan upaya pembinaan Koperasi Unit Desa.

Universitas Terbuka

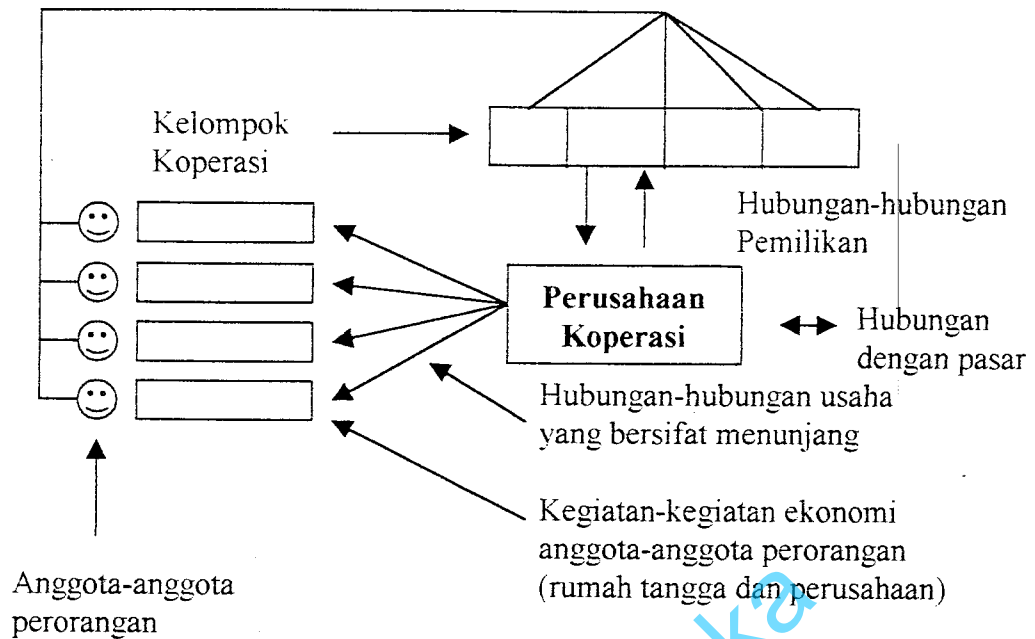
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Hakekat dibentuknya koperasi adalah karena adanya kebutuhan yang sama dari anggotanya untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan ekonomi atau dalam kegiatan berusaha. Koperasi yang baik, artinya dapat hidup dan berkembang kearah yang dicita-citakan apabila seluruh komponen yang ada dalam koperasi seperti alat perlengkapan organisasi koperasi yaitu Rapat Anggota, Pengurus (manajer dan karyawan), Pengawas serta seluruh anggota dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rapat Anggota, fungsi dan peranan pengurus, pengawas merupakan prasyarat yang mutlak karena koperasi merupakan lembaga ekonomi yang memiliki hubungan-hubungan utama antara unsur-unsur organisasi koperasi, yaitu anggota-anggota perorangan, kegiatan ekonomi anggota, kelompok koperasi, perusahaan koperasi dan organisasi sebagai suatu sistem sosial ekonomi yang menurut Hanel. A (1985 : 32) sebagai berikut :



Gambar 1. Organisasi Koperasi Sebagai Suatu Sistem Sosial Ekonomi.

Berdasarkan gambar/bagan di atas maka dapat diketahui hubungan antara anggota perorangan, kelompok koperasi dan perusahaan koperasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya kelompok koperasi yang terdiri dari orang-orang yang merasakan keterkaitan karena adanya kesamaan tujuan yang ingin dicapai.
2. Kelompok koperasi ini bercirikan motivasi swadaya yaitu berusaha memenuhi tujuan melalui kerjasama diantara mereka.
3. Adanya perusahaan yang bersifat permanen yang didirikan, dibiayai dan diawasi secara bersama dan berfungsi sebagai sarana untuk pencapaian kebutuhan para anggota.
4. Adanya hubungan khusus antara perusahaan bersama di atas dengan para anggota, yaitu untuk meningkatkan kepentingan anggota atau sering disebut promosi anggota.

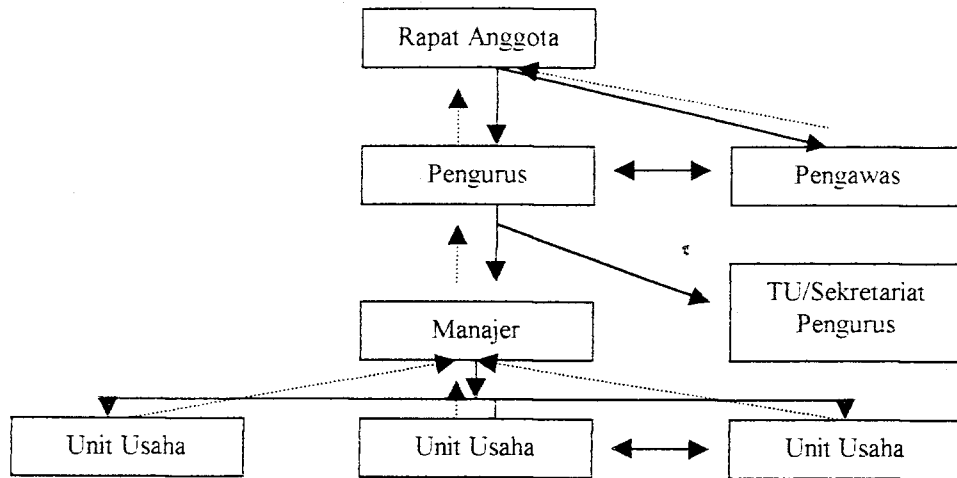
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui dengan jelas dasar terbentuknya koperasi adalah atas kehendak anggota, yaitu anggota yang telah membentuk kelompok koperasi dengan ciri-ciri semangat swadaya, berusaha secara bersama melalui pendirian perusahaan bersama yang disebut perusahaan koperasi.

Supaya koperasi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan pengelolaan organisasi maupun usaha yang baik, atau dengan kata lain diperlukan manajemen yang baik. Menurut Saksono (1984 : 26) bahwa :

"Jika dilihat dari kerja manajemen, maka dalam mengelola organisasi koperasi, berarti melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Sehubungan dengan definisi manajemen, maka manajemen koperasi pada dasarnya dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang berorientasi pada keputusan dan tindakan terkendali untuk mencapai tujuan".

Serangkaian proses adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan koperasi yang berorientasi pada keputusan Rapat Anggota, yang dilaksanakan oleh pengurus dan manajer, diawasi oleh pengawas untuk mencapai tujuan koperasi.

Selanjutnya untuk melihat struktur organisasi koperasi yang mencerminkan hak dan kewajiban dalam proses manajemen koperasi menurut Pedoman Administrasi Perkantoran KUD yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi (1985 : 7) adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi KUD

Keterangan :

←.....→ Garis Putus-putus = pertanggungjawaban ke atas
 → Garis Perintah

Gambar 2 menunjukkan bahwa Rapat Anggota pemegang merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi. Berdasarkan UU Nomor 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Rapat Anggota menetapkan :

- Anggaran dasar ;
- Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
- Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas ;
- Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan ;
- Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya ;
- Pembagian sisa hasil usaha ;
- Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Apabila diperhatikan keputusan-keputusan yang menjadi kewenangan Rapat Anggota, maka dalam proses pelaksanaan Rapat Anggota yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi, maka semua anggota diharapkan dapat berpartisipasi secara maksimal. Dalam forum Rapat Anggota dibahas dan ditetapkan program kerja baik bidang organisasi maupun bidang usaha,

keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota tersebut tentunya berorientasi kepada upaya peningkatan kesejahteraan anggota koperasi secara keseluruhan.

Pengurus sebagai salah satu unsur alat perlengkapan organisasi atau sebagai unsur pelaksana dari manajemen koperasi, berkewajiban melaksanakan seluruh keputusan Rapat anggota. Kemampuan pengurus dalam melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Anggota untuk mencapai tujuan koperasi dipengaruhi oleh berbagai aspek. Menurut Nanik Widiyanto (1989 : 28), syarat-syarat sebagai seorang pengurus ialah :

1. Turut mengambil bagian dalam usaha koperasi, serta telah memenuhi kewajiban dalam koperasi, seperti membayar simpanan pokok (dan simpanan wajib) dan telah berpengalaman dalam usaha koperasi ;
2. Dapat menyediakan waktu untuk menghadiri rapat pengurus serta turut mengeluarkan pendapat dan buah pikiran yang berguna demi kemajuan para anggota;
3. Mengerti dan mempunyai pengalaman tentang organisasi koperasi serta aktif memperhatikan kerapian organisasi koperasi;
4. Bersedia mendengar usul-usul atau keberatan dari pihak anggota guna kebaikan bersama serta membicarakan hal itu dalam rapat pengurus;
5. Para pengurus harus menghargai pendapat sesama anggota yang walaupun tidak selalu sama, akan tetapi perlu juga diperhatikan sebelum mengambil keputusan;
6. Anggota pengurus harus mematuhi keputusan rapat anggota pengurus dan tidak dibenarkan menjalankan kepercayaan sendiri-sendiri;
7. Para pengurus adalah pemegang kepercayaan dari Rapat Anggota dan karenanya merupakan suatu jabatan kehormatan sehingga jangan sampai mengecewakan para anggota.
8. Pengurus harus bersikap bersedia menerima kemajuan-kemajuan teknik baru dan penemuan-penemuan ke arah pembaharuan.

Sedangkan tanggung jawab pengurus koperasi/KUD menurut Nanik Widiyanto (1989 : 30) antara lain sebagai berikut :

1. Pengurus wajib memahami isi Undang-Undang Koperasi, memahami pula tiap-tiap pasal dan ayat yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi / KUD.
2. Pengurus disamping tugasnya memberikan petunjuk kepada manajer, juga wajib memberikan teguran-teguran dan peringatan-peringatan, apabila manajer tidak melakukan pekerjaan menurut rencana usaha yang telah ditetapkan ;
3. Kewajiban pengurus juga memerintahkan agar manajer memberikan laporan tiap bulan terhadap pekerjaannya ;
4. Pengurus berkewajiban menghadiri rapat-rapat pengurus, rapat pengurus dapat dilakukan hanya antar pengurus saja, antara pengurus dengan manajer saja, antara pengurus dengan manajer dan staf dan mungkin ditambah dengan beberapa orang anggota.
5. Pengurus sebagai pimpinan yang menyediakan prasarana kebijaksanaan dan peralatan kerja organisasi kepada manajer, berkewajiban untuk memahami syarat-syarat kontrak kerja sama dengan pihak lain, memahami transaksi-transaksi yang dilakukan oleh koperasi/KUD, dalam sewa menyewa perkreditan, pinjaman-pinjaman, pengihan-penagihan, kegiatan perdagangan dan sebagainya;
6. Setiap rencana perluasan usaha pengurus wajib melakukan penjajagan terlebih dahulu. Apakah kegiatan usaha benar-benar akan menambah kegiatan yang menguntungkan bagi koperasi/KUD. Dan apabila pengurus sudah yakin, maka pembelanjanya dicairkan oleh pengurus dalam rencana yang telah terinci.
7. Kewajiban pengurus juga menerima (Badan Pemeriksa, Badan Pengawas) bila badan pengawas akan melakukan pengawasan terhadap organisasi usaha dan administrasi maupun keuangan KUD. Dalam hal ini pengawasan badan pengawas ini pengurus diharapkan mampu mengoreksi kembali kebijakan-kebijakan yang disarankan oleh Badan Pengawas.

Wewenang untuk mengawasi jalannya kehidupan koperasi baik dari segi organisasi maupun usaha sesuai keputusan Rapat Anggota adalah Badan Pengawas, merupakan salah satu diantara alat perlengkapan organisasi koperasi di samping Rapat Anggota dan Pengurus. Pengawas mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas pengurus supaya program kerja yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai hasil keputusan Rapat Anggota.

Adapun syarat-syarat menjadi pengawas koperasi/KUD menurut Nanik Widiyanto (1989 : 33), sebagai berikut :

1. Syarat Umum : mempunyai sifat jujur dan terampil bekerja.
2. Syarat Khusus : biasanya diatur dalam Anggaran Dasar, misalnya mempunyai dasar pendidikan yang cukup, mempunyai pengertian dan pengetahuan tentang pembukuan dan perkoperasian, obyektif dan mampu merahasiakan hasil pemeriksaan kepada Rapat Anggota.

Badan pengawas yang mewakili anggota untuk melakukan pengawasan atas jalannya organisasi maupun usaha koperasi. Apabila dilihat dari sudut manajemen koperasi di Indonesia. Maka peranan badan Pengawas adalah menjalankan fungsi pengawasan (control), karena itu untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan suatu keahlian, khususnya di bidang pembukuan serta di bidang perundang-undangan yang ada.

Ketentuan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 38 ayat (1) bahwa Badan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Tidak dimungkinkannya anggota Badan Pengawas ini diambil dari luar anggota, dapat menjadi kendala dalam memilih orang yang tepat sebagai Badan Pengawas dalam suatu struktur organisasi koperasi, hal tersebut terutama bagi koperasi yang berada di daerah pedesaan.

Berdasarkan modal kepercayaan yang diberikan anggota terhadap pengurus itulah maka koperasi mempunyai modal immaterial yang dapat mewujudkan cita-citanya, karena anggota koperasi akan senantiasa mendukung kebijakan-kebijakan pengurus. Herman Soewardi (1985 : 45) berpendapat, tidak adanya rasa memiliki dan keyakinan bahwa koperasi adalah wahana yang dibentuk demi kepentingan, merupakan sebab utama

para anggota enggan menunjukkan keikutsertaannya. Oleh karena itu mereka kurang bertanggung jawab dalam menjaga kelangsungan hidup setiap usaha dari koperasi yang sebenarnya merupakan wahana yang dapat memenuhi kepentingan akan mudah lumpuh dan tidak akan mempertahankan kegiatan atau aktivitas usahanya. Dengan demikian keikutsertaan atau partisipasi anggota dalam setiap kegiatan koperasi tergantung pada sikap anggota terhadap adanya rasa memiliki.

Setiap anggota atau paling tidak beberapa anggota mengetahui pengetahuan dasar tentang prinsip-prinsip dan praktik koperasi serta tentang fungsi-fungsi perkumpulan koperasi sebagaimana mereka mengetahui aspek teknis dan ekonomi pelaksanaan usaha koperasi. Jika tidak demikian, bahagian yang harus dimainkan para anggota dalam setiap perkumpulan koperasi yang murni tetap semu belaka, hak-hak mereka hanya ada di atas kertas, dan demikian pula dengan perkumpulan koperasinya. Hal ini adalah salah satu alasan mengapa pemimpin-pemimpin koperasi selalu menekankan pentingnya pendidikan bagi anggotanya.

Hanel. A. (1985 : 124) menjelaskan, ada empat syarat keberhasilan organisasi koperasi yang diterima oleh teori ekonomi koperasi :

1. Berusaha secara efisien dan produktif, artinya koperasi itu harus memberika manfaat dari usaha bersama itu dan menghasilkan potensi peningkatan pelayanan yang cukup, artinya harus berusaha secara efisien sebagai perusahaan/badan usaha, dan sanggup bersaing dengan berhasil di pasar.
2. Efisien dan efektif bagi para anggotanya.
3. Memberikan kepada semua anggotanya dalam jangka panjang, suatu saldo positif antara kemanfaatan yang diperolehnya dari koperasi dan sumbangan kepada koperasi.

4. Menghindari terjadinya situasi, dimana kemanfaatan dari usaha bersama itu merupakan "barang milik umum" atau dengan kata lain mencegah timbulnya dampak lain dari penumpang gelap. (Free rider).

Berdasarkan pendapat Hanel. A. (1985 : 243), untuk menilai keberhasilan koperasi ada tiga jenis efisiensi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur, yakni :

1. Efisiensi pengelolaan usaha, adalah efisiensi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dikelola berdasarkan prinsip koperasi.
2. Efisiensi yang berkaitan dengan pembangunan adalah tingkat efisiensi yang dihasilkan organisasi koperasi, karena memberikan dampak-dampak langsung atau tidak langsung dalam hal kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.
3. Efisiensi yang berorientasi anggota adalah suatu tingkat dimana kepentingan dan tujuan para anggota, melalui berbagai kegiatan pelayanan yang bersifat menunjang dari lembaga koperasi.

Selanjutnya Ropke (1989) yang disunting Hendar dan Kusnadi, mengatakan bahwa kualitas partisipasi tergantung pada interaksi 3 (variabel) yaitu : a. Para Anggota, b. Manajemen Koperasi, dan c. Program.

Partisipasi dalam melaksanakan pelayanan yang disediakan koperasi akan berhasil apabila ada kesesuaian (fit) antara anggota, program dan manajemen. Kesesuaian antara kebutuhan anggota dan keluaran (output) program koperasi, selanjutnya akan menentukan keberhasilan usaha koperasi.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

1. Ada pengaruh positif yang simultan antara Kinerja Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi yaitu (Rapat, Pengurus dan Pengawas) terhadap keberhasilan usaha KUD di Kabupaten Bengkulu Utara , Propinsi Bengkulu.
2. Ada pengaruh partial kinerja Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas terhadap Keberhasilan Usaha KUD.

Universitas Terbuka

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian Yang Digunakan

Penelitian yang dilakukan secara ilmiah adalah usaha untuk mengungkapkan fenomena hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode survey sampel. Metode survey bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang objek yang diteliti, menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel yang kedudukannya masing-masing sudah diuraikan dalam tinjauan pustaka.

3.2. Struktur Penelitian

3.2.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini melibatkan beberapa konstruk (Construct) yang secara operasional disebut variabel yaitu :

- a. Rapat Anggota
- b. Pengurus
- c. Pengawas
- d. Keberhasilan Anggota

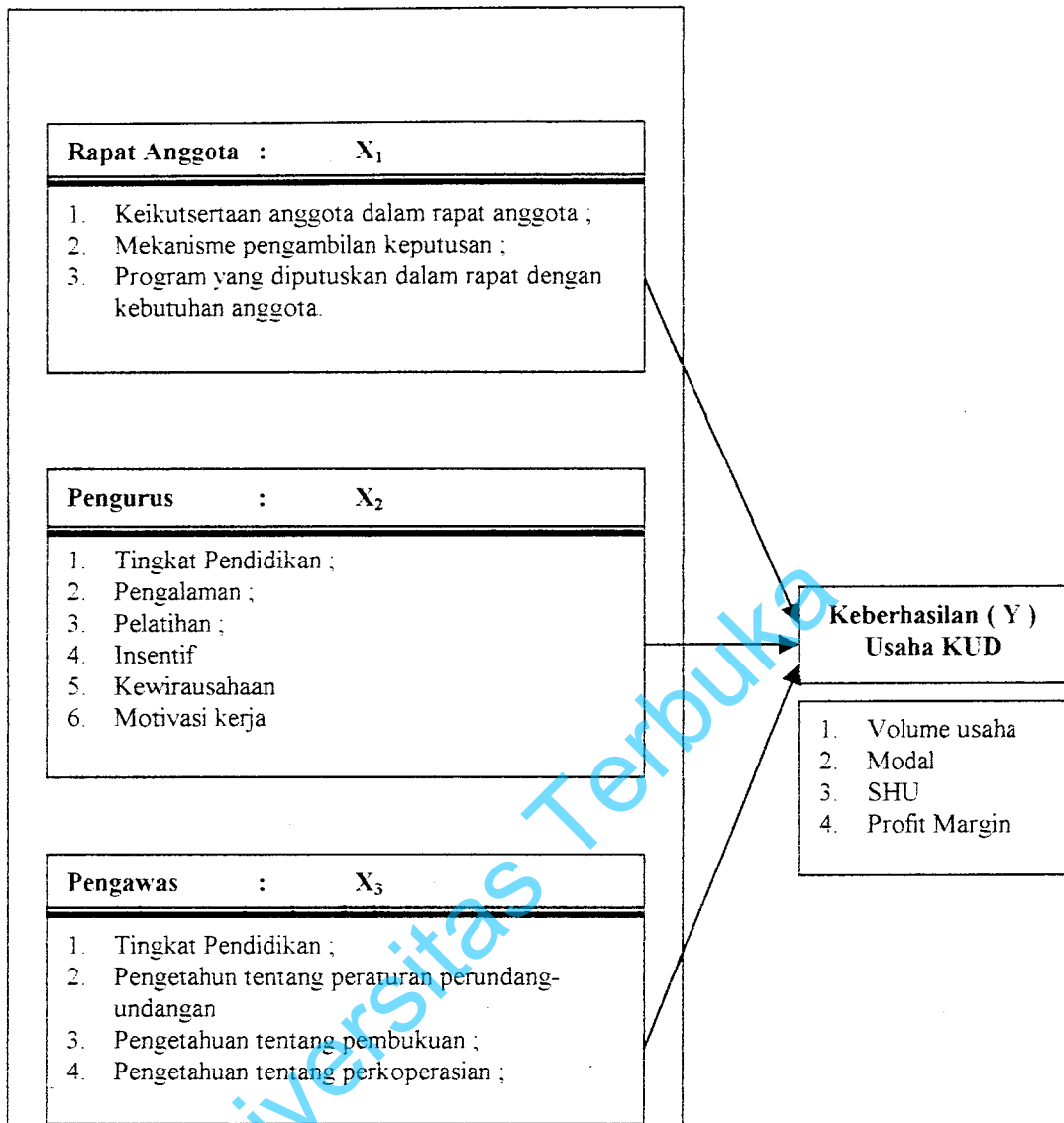
3.2.2. Konseptualisasi Variabel

- (1) Rapat Anggota Koperasi adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi. Rapat Anggota ditetapkan arah atau tujuan, kebijakan umum, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan

belanja koperasi. Penelitian ini ingin melihat pelaksanaan Rapat Anggota dan pengaruhnya terhadap keberhasilan usaha koperasi.

- (2) Pengurus adalah pemegang mandat Rapat Anggota yang melaksanakan manajemen organisasi dan usaha sesuai keputusan Rapat Anggota.
- (3) Pengawas adalah mewakili seluruh anggota yang diberi mandat oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap jalannya kegiatan organisasi dan usaha koperasi, dalam penelitian ini ingin melihat seberapa jauh pengaruh pengawas dalam melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap keberhasilan usaha koperasi.
- (4) Keberhasilan usaha koperasi, dinilai dari volume usaha, permodalan, dan Sisa hasil Usaha (SHU) dan profit margin.

Konseptualisasi variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3 : Paradigma Penelitian

Gambar 3 di atas menunjukkan Pengaruh Kinerja Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi yaitu Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas serta partisipasi Anggota terhadap keberhasilan Usaha KUD sebagai berikut :

1. Rapat Anggota X_1

Yang terdiri dari :

- a. Keikutsertaan anggota dalam Rapat Anggota, yaitu apakah seluruh anggota atau sebagian besar anggota dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat Anggota.
- b. Dalam mengambil keputusan, apakah dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, artinya keputusan tersebut mencerminkan kehendak sebagian besar atau seluruh anggota;
- c. Program yang diputuskan dalam Rapat Anggota apakah sesuai dengan kebutuhan anggota.

2. Pengurus KUD X₂

Yang terdiri dari :

- a. Tingkat pendidikan pengurus, yaitu jenjang pendidikan yang telah ditamatkan oleh pengurus seperti : SD, SLTP, SLTA dan PT.
- b. Pengalaman kerja yang pernah dijalani pengurus dalam kegiatan ekonomi seperti : pernah menjadi staf dalam koperasi, lamanya pengalaman sebagai pengurus.
- c. Kegiatan pelatihan yang pernah diikuti pengurus di bidang perkoperasian.
- d. Insentif yang diberikan kepada pengurus dalam menjalankan tugasnya, apakah ada atau tidak ada.
- e. Apakah pengurus memiliki sifat/jiwa kewirausahaan di dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus KUD.

- f. Bagaimanakah motivasi kerja yang dimiliki oleh para pengurus KUD, apakah sesuai dengan prinsip kerja koperasi

3. Badan Pengawas X_3

Yang terdiri dari :

- a. Tingkat pendidikan yang telah dijalani oleh pengawas KUD seperti : SD, SLTP, SLTA dan PT.
- b. Tingkat pengetahuan pengawas terhadap peraturan tentang perkoperasian serta peraturan tentang hukum tata niaga, perbankan dan kebijaksanaan lainnya di bidang perekonomian, pengetahuan tentang administrasi pembukuan/akuntansi koperasi.
- c. Pengetahuan Pengawas tentang seluk beluk perkoperasian di Indonesia.

4. Keberhasilan Usaha KUD Y

Keberadaaan usaha KUD dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu :

- a. Tingkat volume usaha
- b. Perkembangan modal
- c. Tingkat SHU (Rentabilitas)
- d. Profit margin

3.2.3. Operasionalisasi Variabel

Untuk menguji hipotesis yang diajukan maka terlebih dahulu, setiap variabel akan dideteksi dan diukur melalui operasionalisasi variabel yaitu :

- (1) Rapat Anggota (X_1) indikatornya adalah :

Keberhasilan operasional ; yaitu pelaksanaan rapat anggota tepat pada waktunya, sebagian besar anggota hadir dalam Rapat Anggota, pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis, semua anggota yang hadir diberi kesempatan yang sama menyampaikan pendapatnya, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, dalam memutuskan program kerja, rencana anggaran dan pendapatan koperasi yang diputuskan secara bersamaan.

- (2) Pengurus (X_2) indikator keberhasilan Operasional diukur dengan seberapa jauh kinerja pengurus dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mencapai program yang telah ditentukan koperasi yang ditunjang oleh:

Tingkat pendidikan, pengalaman, pelatihan, insentif, kewirausahaan, dan motivasi kerjanya.

- (3) Pengawas (X_3) indikator keberhasilan operasional diukur dengan seberapa jauh kinerja pengawas dalam tugas dan kewajiban melaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan tugas pengurus, sehingga program yang telah diputuskan dalam rapat anggota dapat tercapai dengan baik. Keberhasilan operasional ini ditunjang oleh tingkat pendidikan, pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, pengetahuan tentang pembukuan, pengetahuan tentang perkoperasian.

- (4) Keberhasilan usaha (Y) indikator adalah keberhasilan operasional, tercapainya program yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota bahkan apabila dapat melebihi dari target rencana yang meliputi volume usaha, modal usaha, besarnya SHU, profit margin.

Menurut Badan Peneliti dan Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi (Balitbangkop), volume usaha menunjukkan besarnya pelayanan koperas/KUD kepada anggota dan non anggota, baik melalui transaksi pembelian maupun transaksi penjualan barang dan jasa.

Penjelasan di atas, memberikan tekanan bahwa besar kecilnya volume usaha sangat tergantung pada keberadaan anggota, yang nantinya akan membentuk kekuatan modal sendiri dan juga kekayaan koperasi/KUD serta pengelolaan pengurus/manajer yang dapat mengendalikan interaksi dari faktor-faktor yang membentuk volume usaha.

Modal menurut Bakker yang dikutip Bambang Riyanto (1991) adalah baik berupa barang konkrit yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debet (modal konkrit) maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang terdapat di sebelah kredit (modal abstrak).

Modal konkrit dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu modal kerja dan modal tetap. Sedangkan modal abstrak terdiri dari modal sendiri dan modal asing (Ediliud, 1994 : 170). Menurut Sugianto (1992 : 92) modal

koperasi dapat dihimpun baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 41 ayat

(1, 2 dan 3) menyatakan bahwa :

1. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Modal sendiri berasal dari : simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.
3. Modal pinjaman dapat berasal dari : anggota, koperasi lainnya, Bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi ndan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah.

Sisa Hasil Usaha merupakan kelebihan pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh koperasi/KUD dalam periode tertentu. Besar kecilnya SHU akan ditentukan pula oleh besar kecilnya volume usaha koperasi/KUD dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bila volume usaha besar diikuti dengan biaya operasi yang besar, maka SHU akan semakin kecil.

Besarnya Sisa Hasil Usaha sangat dipengaruhi oleh partisipasi anggota dalam permodalan dan pemanfaatan pelayanan dari koperasi/KUD serta berfungsi secara aktif pengurus dalam mengendalikan interaksi faktor-faktor atau sumber daya koperasi.

Semakin besar modal yang diperoleh dari anggota akan membantu memperlancar dan memperbesar usaha koperasi, demikian juga dengan semakin besar anggota memanfaatkan pelayanan koperasi/KUD maka dapat memperbesar tingkat perputaran modal usaha sehingga SHU akan semakin bertambah besar.

(5) Indikator dan Pembobotan Variabel

Tabel 3.1. Indikator dan Pembobotan Variabel

Rapat Anggota (X_1)

Indikator	Pengukuran	Skor
1. Ketetapan waktu pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.	a. Tidak pernah tepat waktu b. Kadang-kadang saja tepat waktu c. Selalu tepat waktu	1 2 3
2. Kehadiran seluruh anggota dalam rapat anggota tahunan	a. Yang hadir antara 40 - 50 % b. Yang hadir antara 51 - 60 % c. Yang hadir 61 - ke atas	1 2 3
3. Keikutsertakan anggota dalam menyampaikan pendapat dalam rapat anggota tahunan	a. Kurang aktif (menerima apa adanya yang diajukan pengurus) b. Sebagian kecil yang aktif menyampaikan pendapat (< 50 %) c. Sebagian besar yang aktif menyampaikan pendapat (> 50 %)	1 2 3
4. Setiap anggota diberi hak suara yang sama dalam menyampaikan pendapatnya dalam rapat.	a. Tidak b. Kadang-kadang c. Ya	1 2 3
5. Program yang ditetapkan dalam rapat anggota sesuai dengan kebutuhan anggota.	a. Tidak sesuai b. Sebagian sesuai c. Seluruhnya sesuai	1 2 3
6. Pengambilan keputusan dalam rapat anggota berdasarkan suara anggota yang terbanyak.	a. Tidak b. Kadang-kadang c. ya	1 2 3

Pengurus (X_2)

Indikator	Pengukuran	Skor
(1)	(2)	(3)
7. Pendidikan formal	a. SD b. SLTP – SLTA c. D3 - S1	1 2 3
8. Pendidikan non formal (misalnya kursus-kursus) selama menjadi pengurus.	a. < 2 kali b. 3 - 4 kali c. > 5 kali	1 2 3

(1)	(2)	(3)
9. Pengalaman kerja sebagai pengurus koperasi selama menjadi pengurus.	a. < 3 tahun b. 3 - 4 tahun c. > 5 tahun	1 2 3
11. Otoritas dalam pengambilan keputusan	a. Ada tapi kecil b. Cukup besar c. Penuh	1 2 3
12. Jam kerja efektif tiap minggu melaksanakan tugas pengurus.	a. < 12 jam b. 12 - 18 jam c. > 18 jam	1 2 3
13. Inisiatif/gagasan untuk memajukan koperasi	a. Tidak pernah ada b. Ada tapi hanya sebagian kecil yang direalisasikan c. Ada dan semua direalisasikan	1 2 3
14. Realisasi program kerja yang diamanatkan Rapat Anggota.	a. < 60 % b. 60 - 80 % c. > 80 %	1 2 3
15. Penyelenggaraan administrasi usaha oleh pengurus dengan sistem pembukuan/akuntansi.	a. Tidak ada b. Kurang lengkap c. lengkap	1 2 3
16. Pelaksanaan rapat/pertemuan antar pengurus koperasi 1 tahun	a. < 4 kali b. 4 - 8 kali c. > 8 kali	1 2 3
17. Pengembangan program kerja koperasi yang telah dirumuskan dalam rapat anggota.	a. Tidak dilakukan b. Kadang-kadang c. Selalu dilakukan	1 2 3
18. Pemanfaatan setiap peluang bisnis untuk pengembangan usaha ko namun tidak menyimpang dari keputusan RAT.	a. Tidak dilakukan b. Kadang-kadang c. Selalu dilakukan	1 2 3
19. Memahami dan menghayati secara tepat tugas dan kewajiban serta peranan pengurus.	a. Tidak b. Sebagian saja c. Seluruhnya dipahami & dilaksanakan	1 2 3
20. Bekerja sebagai pengurus koperasi untuk mendapat upah/gaji.	a. Ya b. Salah satu tujuan c. tidak	1 2 3
21. Kalau koperasi berhasil dalam usaha sebaiknya yang menikmati adalah	a. Pengurus saja b. Orang yang aktif saja c. Seluruh unsur yang ada pada koperasi	1 2 3

Pengawas X₃

(1)	(2)	(3)
22. Pendidikan Formal	a. SD b. SLTP - SLTA c. D 3 - S1	1 2 3
23. Pendidikan non formal (misalnya kursus-kursus)	a. < 2 kali b. 3 - 4 kali c. > 5 kali	1 2 3
24. Pelatihan perkoperasian sesuai dengan jabatan pengawas koperasi	a. < 2 kali b. 3-4 kali c. > 5 tahun	1 2 3
25. Pengalaman kerja sebagai pengawas koperasi	a. < 3 tahun b. 3-4 tahun c. > 5 tahun	1 2 3
26. Otoritas dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawas	a. Ada tapi kecil b. Cukup besar c. Penuh	1 2 3
27. Jam kerja efektif tiap minggu melaksanakan tugas pengurus	a. < 3 jam b. 3-6 jam c. > 6 jam	1 2 3
28. Realisasi program kerja yang diamanatkan Rapat Anggota	a. < 60% b. 60-80% c. > 80%	1 2 3
29. Penyelenggaraan administrasi kegiatan pengawasan	a. Tidak ada b. Kurang lengkap c. Lengkap	1 2 3
30. Pelaksanaan rapat/pertemuan antar pengawas koperasi 1 tahun	a. < 4 kali b. 4-6 kali c. > 6 kali	1 2 3
31. Pengetahuan pengawas tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi	a. Tidak ada b. Hanya sebagian c. Seluruhnya dipelajari	1 2 3
32. Pengetahuan pengawas tentang administrasi pembukuan koperasi (sistem akuntansi)	a. Tidak diketahui b. Hanya sebagian c. Diketahui semua	1 2 3
33. Memahami dan menghayati secara tepat tugas dan kewajiban serta peranan pengawas	a. Tidak b. Sebagian saja c. Seluruhnya dipahami dan dilaksanakan	1 2 3
34. Dalam menjalankan tugas pengawasan terdapat penyimpangan pelaksanaan tugas pengurus apakah langsung diperingati	a. Tidak b. Kadang-kadang c. ya	1 2 3

Keberhasilan Usaha (Y)

Indikator	Pencapaian
(1)	(2)
1. Tingkat Volume Usaha	a. < 60 % b. 61 – 79 % c. > 80 %
2. Perkembangan Modal	a. < 60 % b. 61 – 79 % c. > 80 %
3. Tingkat SHU	a. < 60 % b. 61 – 79 % c. > 80 %
4. Profit Margin	a. < 60 % b. 61 – 79 % c. > 80 %

3.2.4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik pengumpulan data dan informasi yaitu dengan kuisioner, wawancara dan dokumentasi.

- (1) Kuisioner : yaitu daftar pertanyaan untuk menggali informasi dari para anggota, pengurus dan pengawas.
- (2) Wawancara : yaitu pengajuan sejumlah pertanyaan kepada pengurus/pengawas dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data tentang Rapat Anggota, Kinerja Pengurus dan Keberhasilan Usaha KUD.
- (3) Dokumentasi : yaitu dengan mengkaji atau menelaah data-data atau catatan-catatan/pembukuan laporan keuangan KUD untuk memperoleh tentang keberhasilan usaha KUD yang menyangkut volume usaha, modal usaha, sisa hasil usaha dan profit margin

Konsep/Variabel	Dimensi	Sumber	Instrumen	Jenis Skala
1. Alat Perlengkapan				
a. Rapat Anggota	Pelaksanaan Rapat Anggota	- Pengurus - Pengawas - Anggota	- Wawancara - Wawancara - Kuisioner	Ordinal Ordinal Ordinal
b. Pengurus	Pelaksanaan tugas & kewajiban	- Pengurus	- Kuisioner	Ordinal
c. Pengawas	Pelaksanaan tugas/kewajiban	- Pengawas	- Kuisioner	Ordinal
2. Keberhasilan usaha KUD	Peningkatan volume usaha, modal dan SHU Profit Margin	- Pengurus	- Dokumen	Rasio

3.3. Strategi Penelitian

3.3.1. Tipe dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian observasional (non experimental research) dengan menggunakan rancangan survey (survey design).

3.3.2. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah KUD yang ada sejumlah 45 KUD dari 12 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara.

3.3.3 Sampel Penelitian

Berhubung jumlah KUD di Kabupaten Bengkulu Utara cukup banyak, sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengalami keterbatasan waktu, tenaga dan dana, maka dalam penelitian diambil sampel yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Jadi jumlah KUD sampel adalah 23 dari 12 kecamatan, artinya sampel diambil 50% + 1 dari populasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu daerah di wilayah Bengkulu. Daerah ini beribukota di Arga Makmur. Luas Kabupaten Bengkulu adalah 9.585,24 Km². Terdiri dari 12 Kecamatan dan terletak antara 101°32' – 102°8' BT dan 2°15'-4° LS.

Kondisi geografisnya sebagian besar merupakan daratan dengan ketinggian 150 m di atas permukaan laut terdapat di bagian barat membujur ke arah pantai dari Selatan ke Utara, sedangkan di bagian Timur topografinya berbukit-bukit dengan ketinggian 541 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Bengkulu Utara berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara dengan Propinsi Sumatera Barat (Sumbar)
- b. Sebelah Selatan dengan kabupaten Bengkulu Selatan dan Kotamadia Bengkulu
- c. Sebelah Timur dengan Propinsi Jambi dan Rejang Lebong.
- d. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Dari sisi hidrologis Bengkulu Utara memiliki ± 117 sungai yang berhulu di sisi Timur Bukit Barisan dan mengalir ke Samudera Indonesia. Kabupaten Bengkulu Utara banyak bergerak di sektor pertanian yang mencakup lima sub sektor, yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan,

perhutanan, peternakan dan perikanan. Sektor ini merupakan sektor utama pendukung dan pembangunan di kabupaten Bengkulu Utara. Lebih kurang 79 persen penduduk di kabupaten ini bergerak di sektor pertanian. selain itu 10,5 persen luas wilayah Bengkulu Utara adalah lahan pertanian dan perkebunan.

4.1.1. Luas dan Pola Penggunaan Tanah

Luas penggunaan tanah di wilayah kabupaten Bengkulu Utara sebagai besar oleh petani hal ini sesuai dengan kondisi kabupaten Bengkulu Utara sebagai daerah pertanian. Keadaan pola penggunaan tanah dapat dilihat pada gambaran tat guna lahan di kabupaten Bengkulu Utara pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1 Tata Guna Lahan di kabupaten Bengkulu Utara.

No.	Penggunaan Tanah	Jumlah (Ha)	Persentase
01	Sawah	26.653	3,95
02	Kebun/ladang rakyat	105.200	16,19
03	Tambak ikan/udang	1.252	0,19
04	Perkebunan besar swasta	63.231	9,73
05	Hutan Lindung	280.427	43,17
06	Hutan Budidaya	157.458	24,24
07	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	13.760	2,12
08	Lain-lain	2.628	0,40
Jumlah		649.609	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bengkulu Utara tahun 1999, diolah.

Dari tabel di atas, tampak penggunaan lahan terbatas adalah untuk hutan lindung sebesar 43,17 persen dari seluruh wilayah kabupaten, disusul kemudian hutan budidaya 24,24 persen dari kebun/lahan rakyat 16,19 persen serta perkebunan besar swasta 9,73 persen. Potensi luas lahan yang

dapat digunakan secara produktif sebesar 366.554 hektar atau 54,43 persen dari seluruh luas lahan di wilayah kabupaten Bengkulu Utara.

4.1.2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk kabupaten Bengkulu Utara hasil registrasi pada tahun 1999 sebanyak 406.725, terdiri dari 205.304 orang laki-laki dan 201.421 orang perempuan. Ini berarti sex ratio atau rasio jenis kelamin antara penduduk laki-laki dan perempuan di kabupaten Bengkulu Utara sebesar 101,24 pada tahun 1999 dengan tingkat kepadatan penduduk 42,43 orang/km².

Keadaan penduduk di kabupaten Bengkulu Utara pada akhir tahun 1999 seperti pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Keadaan Penduduk dalam kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kel. Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persen
0 – 14	85.323	86.145	171.468	42,16
15 – 64	116.227	111.753	227.980	56,05
65 keatas	3.754	3.523	7.277	1,79
Jumlah	205.304	201.421	406.725	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bengkulu Utara tahun 1999, diolah.

Pada tabel 4.2 di atas, terlihat penduduk kabupaten Bengkulu Utara termasuk dalam golongan penduduk tidak produktif yaitu dengan melihat struktur umur di bawah 15 tahun dan 65 ke atas tahun sebesar 178.745 orang atau 43,95 persen, dan struktur umur di atas 15 tahun sampai dengan 64 tahun sebesar 227.980 orang atau 56,05 persen termasuk golongan penduduk produktif.

Di tinjau dari *dependency ratio* atau Rasio Beban Ketergantungan antara penduduk umur 0 – 14 tahun ditambah penduduk umur di atas 65 tahun dibandingkan dengan penduduk berusia 15 – 64 tahun sebesar 78,40 persen. Artinya 100 orang berumur produktif menanggung beban 79 orang yang tidak produktif. Begitu juga *Man Land Ratio*, yakni perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan yang produktif sebesar 1,11. Artinya 1 orang penduduk mempunyai 1,11 hektar luas lahan yang produktif untuk diolah.

4.1.3 Keadaan Perkoperasian di Kabupaten Bengkulu Utara

Untuk mengetahui keadaan perkoperasian di kabupaten Bengkulu Utara, disajikan tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.3 Koperasi di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 1999

No.	Jenis Koperasi	Unit	Anggota	Simpanan	Volume usaha	SHU
1.	KUD	45	23.686	260.765	3.227.481.700	201.388.100
2.	KPN	38	11.708	470.458	300.500.000	50.242.600
3.	Wanita	1	125	9.200	20.463.000	3.200.000
4.	Sekolah	96	15.603	282.376	124.453.000	23.803.000
5.	Non KPN	8	1.773	90.640	80.721.000	23.803.000
6.	Kopontren	7	566	15.830	159.650.000	9.200.000
	Jumlah	195	53.461	1.129.269	3.803.268.7000	327.466.100

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bengkulu Utara tahun 1999, diolah.

Koperasi Unit Desa yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 1999 keseluruhannya berjumlah 45 KUD yang kesemuanya telah dinyatakan sebagai KUD mandiri. Kabupaten Bengkulu Utara terdapat 12 kecamatan, kesemuanya telah terdapat KUD. KUD terbanyak pada

kecamatan Muko-Muko Utara 13 KUD, Muko-Muko Selatan 8 KUD, padang Jaya 5 KUD, dan kecamatan lainnya kurang dari 5 KUD.

Penulis dalam penelitian mengambil sampel sebanyak 23 KUD dari populasi 45 KUD. Untuk mengetahui gambaran tentang 23 KUD mandiri yang menjadi sampel artinya sampel diambil 50 persen ditambah 1 dari populasi. Penulis mengambil sampel 23 KUD yaitu yang tersebar pada 11 kecamatan dari 12 kecamatan di kabupaten Bengkulu Utara. Satu kecamatan terletak pada sebuah pulau yang bernama Enggano, yang transportasi kapal lautnya hanya dilayani 15 hari satu kali pelayaran, untuk itu dengan pertimbangan waktu dan biaya sehingga penulis tidak mengambil sampel pada KUD di kecamatan pulau Enggano tersebut. Sampel 23 KUD, dimana 20 KUD terletak di lokasi daerah transmigrasi, dan hanya 3 KUD yang bukan pada daerah transmigrasi yakni KUD Eko Utomo di kecamatan Pekik Nyaring, KUD Selupu Lama di kecamatan Talang Empat dan KUD Harapan di kecamatan Muko-Muko Utara. Dengan jumlah anggota 13.366 orang dari 21.902 orang anggota KUD di kabupaten Bengkulu Utara..

Pada umumnya sudah lama berdiri, dan berbadan hukum yaitu sejak tahun 1979 semenjak propinsi Bengkulu dipimpin oleh R. Soeprapto pada dua periode tahun 1979 – 1989. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi Bengkulu yang membuka program transmigrasi secara besar-besaran, secara kuantitas wadah KUD berdiri dan berbadan hukum sejalan dengan program pemerintah pusat. Hal ini perlu disadari bahwa sebelum tahun 1979 perkembangan pembangunan propinsi

Bengkulu belum menggembirakan termasuk sektor transmigrasi, dan perlu dijelaskan bahwa kabupaten Bengkulu Utara diresmikan pada tahun 1976 dengan ibukota Arga Makmur, dan merupakan daerah transmigrasi.

4.2 Perkembangan Usaha dan Analisis Ratio Keuangan KUD

Keberhasilan usaha KUD dapat dilihat dari beberapa indikator, dalam penelitian ini indikator yang ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilan usaha KUD terdiri dari tingkat perputaran modal/Total Asset Turnover, ratio rentabilitas, liquiditas, solvabilitas dan profit margin. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan usaha KUD berdasarkan beberapa indikator di atas sebagai berikut:

4.2.1 Tingkat Volume Usaha

Berdasarkan lampiran 3, memperlihatkan tingkat volume usaha KUD di kabupaten Bengkulu Utara secara rata-rata pada 23 KUD sampel secara umum meningkat yaitu Rp. 98.097.035 pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 sebesar Rp. 132.576.730 atau 1,35 persen.

KUD Kemumu di kecamatan kota Arga Makmur merupakan volume usaha yang terbesar, bila dibandingkan dengan KUD lainnya hal ini dapat dilihat volume usaha tahun 1998 – 1999 secara rata-rata sebesar Rp. 459.215.367, disusul oleh KUD Usaha Bersama di kecamatan Ketahun sebesar Rp. 317.485.300, dan KUD Selupu Lama di kecamatan Talang Empat merupakan volume usaha yang paling kecil, dimana secara rata-rata pada tahun 1998 – 1999 hanya sebesar Rp. 13.405.100.

Tingkat volume usaha suatu koperasi merupakan cerminan dari pada pengelolaan usaha KUD oleh pengurus, khususnya di KUD di kabupaten Bengkulu Utara artinya semakin tinggi volume usaha berarti semakin giatnya pengurus dalam menjalankan usaha KUD, dan begitu pula sebaliknya.

4.2.2 Tingkat Perputaran Modal

Berdasarkan pada lampiran 2, hasil perhitungan tingkat perputaran modal usaha KUD pada tahun 1998, dari 23 KUD sampel yang tertinggi atau maksimal sebesar 2,88 yaitu pada KUD Kemumu, sedangkan perputaran modal terendah sebesar 0,16, yaitu pada KUD Sido Muncul. Apabila dilihat dari rata-rata tingkat perputaran modal KUD sampel tahun 1998 rasionya sebesar 1,46. Pada tahun 1999 rasio perputaran modal tertinggi 3,01 yaitu pada KUD Semangat dan terendah sebesar 0,38 yaitu pada KUD Sumber Indah, dan apabila dilihat dari rata-rata rasionya adalah sebesar 1,42.

Berdasarkan rasio tingkat perputaran modal dapat diketahui perhitungan rata-rata, tahun 1998 lebih besar 0,04 dibanding tahun 1999, keadaan itu terjadi karena pada tahun 1998 terdapat beberapa KUD yang rasio tingkat perputaran modalnya lebih tinggi dari tahun 1999. Apabila dilihat dari persentase perkembangan perputaran modal, maka dapat dilihat terjadi peningkatan atau perkembangan sebesar 11,97 persen. Persentase tingkat perkembangan perputaran modal sebesar 11,97 persen dapat

disimpulkan bahwa perkembangan perputaran modal usaha pada KUD di kabupaten Bengkulu Utara rendah.

4.2.3 Tingkat Rentabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan data penelitian laporan keuangan tahun 1998 dari 23 KUD sampel (lampiran 2 dan 4) di daerah kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan bahwa tingkat Rentabilitas Ekonomis rata-rata 9,78 persen, dan Rentabilitas Modal Sendiri sebesar 14,38 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan usaha KUD pada periode tahun 1997 mengalami kenaikan pada tingkat Rentabilitas Ekonomis 2,14 persen dan Rentabilitas Modal Sendiri 0,93 persen dibandingkan periode pembukuan tahun 1998 – 1999. Dengan kata lain bahwa kemampuan usaha KUD Sampel di kabupaten Bengkulu Utara secara umum masih rendah bila dibandingkan tingkat suku bunga tabungan dan deposito pada bank-bank tahun 1998 rata-rata di atas 20 persen.

Dilihat dari segi kemampuan usaha KUD untuk tingkat Rentabilitas Modal Sendiri pada kurun waktu tahun 1998 – 1999 masing-masing 12,23 persen, 17,08 persen, dan 13,45 persen. Hal ini menggambarkan variasi naik turun kemampuan usaha pada tingkat Rentabilitas Modal Sendiri. Dengan kata lain kemampuan usaha KUD di kabupaten Bengkulu Utara untuk memperoleh SHU lebih baik menggunakan modal sendiri bila dibandingkan dengan menggunakan modal asing/pinjaman pada pihak bank atau pihak luar.

Keadaan seperti di atas dapat dikaji lebih lanjut berdasarkan atas teori-teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran pada Bab I di muka bahwa faktor-faktor digunakan untuk meningkatkan Rentabilitas koperasi/KUD adalah :

1. Menaikkan volume usaha yang relatif besar daripada menurunnya tingkat volume usaha KUD.
2. Dengan mengurangi tingkat volume usaha sampai pada tingkat tertentu dan diusahakan pengurangan asset sebesar-besarnya.
3. Menurunkan beban usaha relatif lebih besar daripada menurunnya tingkat volume usaha KUD.
4. Menambah asset sampai pada tingkat tertentu dan diusahakan tambahan tingkat volume usaha yang sebesar-besarnya.

Dari hasil perhitungan data seperti tersebut di atas maka dapat dianalisis lebih lanjut dan akan terlihat sebagai berikut :

1. Tingkat Rentabilitas Ekonomis :

Besar kecilnya tingkat Rentabilitas Ekonomis ditentukan oleh besar kecilnya tingkat SHU KUD dan modal usaha bersih KUD. Adapun yang dimaksud SHU adalah : SHU yang diperoleh KUD selama 1 periode (1 tahun) dari hasil usahanya atau operasinya KUD tidak ikut diperhitungkan dalam penelitian ini. Selanjutnya yang dimaksud dengan modal usaha adalah : seluruh modal yang digunakan pada usaha yang sesuai dengan tujuan usaha KUD tersebut, sedang modal yang ditanam di

luar KUD seperti di Bank, PUSKUD, KUD lain dan sebagainya tidak dimasukkan dalam modal usaha.

Untuk menentukan besarnya tingkat Rentabilitas Ekonomis dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rentabilitas Ekonomis} = \frac{SHU}{\text{Modal Usaha}} \times 100\%$$

Dari data hasil penelitian untuk tahun 1997, dimasukkan dalam rumus adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rentabilitas Ekonomis} &= \frac{Rp.201.338.100}{Rp.2.058.416.700} \times 100\% \\ &= 9,78 \% \end{aligned}$$

artinya bahwa kemampuan KUD pada tahun 1997 mendapatkan SHU dibandingkan dengan modal usaha sebesar 9,78 persen.

Rentabilitas Ekonomis pada tahun 1998 sebesar 7,64 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 1999 menjadi 9,78 persen. Dengan meningkatnya tingkat Rentabilitas Ekonomis ini menunjukkan kemampuan usaha koperasi untuk menghasilkan tingkat SHU meningkat.

2. Tingkat Rentabilitas Modal Sendiri :

Pengertiannya adalah kemampuan dari KUD dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan bersih atau Sisa Hasil Usaha (SHU).

Untuk menentukan tingkat Rentabilitas Modal Sendiri dengan cara atau rumus sebagai berikut :

$$\text{Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{Tingkat SHU}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan tingkat SHU dalam perhitungan di sini adalah laba usaha setelah dikurangi dengan beban bunga modal asing dan modal pajak dan ditambah dengan keuntungan selisih antara harga di luar KUD dengan harga di dalam KUD. Sedangkan yang dimaksud dengan Modal Sendiri KUD dalam perhitungan di sini adalah terdiri dari simpanan wajib anggota KUD, simpanan pokok anggota KUD, cadangan, SHU yang belum dibagi, dan bantuan dari luar KUD berupa donasi.

Berdasarkan hasil perhitungan dari data hasil penelitian pada tahun 1999 tingkat SHU Rp. 6.496.390 bila dibandingkan rata-rata dan tahun 1998 Rp. 5.535.968, sedangkan modal sendiri KUD secara rata-rata tahun 1998 Rp. 41.713.205 dan meningkat pada tahun 1999 sebesar Rp. 44.353.281.

Perhitungan tingkat Rentabilitas Modal Sendiri pada tahun 1999 adalah sebagai berikut :

$$\text{Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{Rp.6.496.390}}{\text{Rp.48.293.889}} \times 100\% = 13,45\%$$

Perhitungan Rentabilitas Modal Sendiri untuk rata-rata tahun 1998 dan tahun 1999 masing-masing 10,29 persen dan 12,23 persen, hal ini menunjukkan adanya mengalami kenaikan 1,94 persen.

Walaupun mengalami kenaikan dari segi tingkat SHU maupun Modal Sendiri, tetapi kalau kenaikan tingkat SHU lebih besar bila

dibandingkan dengan kenaikan Modal Sendiri, hal ini akan menaikkan besarnya tingkat Rentabilitas Modal Sendiri.

4.2.4 Profit Margin

Profit margin yang dicapai oleh KUD adalah untuk mengetahui efisiensi KUD dengan melihat kepada besar kecilnya hasil usaha yang melihat pada volume usaha.

Berdasarkan data pada lampiran 3, tampak bahwa rasio profit margin tertinggi tahun 1998 pada KUD Kemumu sebesar 8,27 persen dan terendah pada KUD Selupu Lama sebesar 1,52 persen, sedangkan rasio rata-rata profit margin dari 23 KUD yang diteliti tahun 1998 sebesar 3,58 persen. Salah satu faktor yang dapat dilihat mempengaruhi tingginya profit margin pada KUD Kemumu dibanding KUD yang lainnya, selain itu dapat ditekannya biaya-biaya operasional, sehingga biaya-biaya dapat dikeluarkan seminimum mungkin. Profit margin yang terendah adalah pada KUD Selupu Lama sebesar 1,52 dikarenakan KUD tersebut mengalami kerugian sebagai akibat kenaikan harga yang melonjak tinggi pada saat resesi ekonomi melanda Indonesia.

Apabila dilihat dari rata-rata rasio profit margin KUD yang diteliti pada tahun 1998 yaitu sebesar 3,58 persen. Pada tahun 1999 rasio profit margin tertinggi tetap pada KUD Kemumu dan terendah pada KUD Selupu Lama sebesar 1.52 persen. Dan apabila dilihat dari rata-rata yaitu sebesar 3,58 persen. Data tingkat rasio profit margin KUD yang diteliti dari tahun

1998 ke tahun 1999 menunjukkan adanya peningkatan rata-rata 3,84 persen. Apabila dibandingkan nilai rasio KUD tersebut dengan standar rasio profit margin untuk BUMN berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI nomor 826/KMK.013/1992 yaitu sebesar 10%, maka tampak bahwa profit margin pada KUD yang diteliti sangat rendah sekali.

Profit margin pada KUD yang diteliti apabila dilihat dari persentase perkembangannya, tampak bahwa terjadi perkembangan cukup baik, yaitu rata-ratanya sebesar 60,54 persen.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh kinerja alat perlengkapan organisasi koperasi terhadap keberhasilan usaha KUD di kabupaten Bengkulu Utara.

4.3.1. Rapat Anggota, Pengurus Dan Pengawas KUD

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi, karena itu Rapat Anggota mutlak dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun. Rapat Anggota dihadiri oleh seluruh anggota, pengurus, pengawas, pejabat koperasi/pemerintah dan para peninjau. Rapat anggota sebagai pencerminan asas demokrasi dalam koperasi, karena itu setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk mengikutinya secara aktif, menyampaikan pendapatnya dan mempergunakan hak suaranya dalam musyawarah untuk mufakat.

Pengurus dalam Rapat Anggota bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya, demikian juga pengawas menyampaikan hasil kerjanya dalam melakukan monitoring terhadap kerja pengurus. Dalam Rapat Anggota juga ditetapkan kebijaksanaan umum dan program kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi pada tahun berikutnya.

Pelaksanaan Rapat Anggota setiap tahun hendaknya diselenggarakan tepat pada waktunya, untuk mengetahui ketepatan waktu pelaksanaan Rapat Anggota pada KUD sampel dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rapat Anggota KUD sampel di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000

Ketepatan Waktu RAT	Frekuensi	Persen
a. Selalu lewat waktu	3	6,52
b. Kadang-kadang	30	65,22
c. Selalu tepat waktu	13	28,26
Jumlah	46	100

Sumber : Data Primer, diolah.

Pelaksanaan waktu Rapat Anggota pada KUD sampel berdasarkan data pada tabel di atas tampak bahwa sebagian besar yaitu 65,22 persen KUD yang melaksanakan Rapat Anggotanya kadang-kadang tepat waktu. Berdasarkan petunjuk teknis penilaian KUD Mandiri yang dikatakan tepat waktu dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, yaitu dilaksanakan antara 1 Januari sampai 31 Maret setelah tutup tahun buku 31 Desember tahun sebelumnya.

KUD yang selalu tepat waktu dalam melaksanakan RAT sebanyak 28,26 persen dan yang tidak pernah tepat waktu sebanyak 6,52 persen. Pelaksanaan RAT tepat waktunya adalah sangat penting karena dengan

demikian pengurus dapat melaksanakan tugasnya sejak awal tahun berdasarkan keputusan Rapat Anggota. Ketepatan waktu pelaksanaan RAT juga dapat menggambarkan kinerja pengurus, baik dari sisi koordinasi kerja organisasi manajemen maupun dari sisi pengelolaan administrasi keuangan koperasi. Untuk mengetahui keputusan dalam RAT sesuai dengan kebutuhan anggota dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5 Keputusan Rapat Anggota Sesuai Dengan Kebutuhan Anggota KUD Sampel di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000

Kesesuaian Keputusan RAT dengan Rapat Anggota	Frekuensi	Persen
a. Tidak sesuai	-	-
b. Sebagian sesuai	7	15,22
c. Seluruhnya sesuai	39	84,78
Jumlah	46	100

Sumber : Data Primer, diolah.

Berdasarkan data pada tabel 4.5 di atas diketahui bahwa sebagian besar, yaitu 84,78 persen Ketua dan Sekretaris Rapat Anggota menyatakan bahwa keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota sesuai dengan kebutuhan anggota, yang menyatakan sebagian yang sesuai sebanyak 15,22 persen dan tidak ada yang menyatakan tidak sesuai.

Kesesuaian keputusan Rapat Anggota dengan kebutuhan anggota, baik yang menyangkut kegiatan organisasi maupun yang menyangkut kegiatan usaha, merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya kesesuaian terhadap kebutuhan anggota dan sesuai dengan aspirasi anggota, maka akan berdampak positif terhadap peran serta anggota untuk mensukseskan setiap keputusan yang telah ditetapkan.

Peranan pengurus dalam kehidupan koperasi memegang peranan yang sangat strategis yaitu sebagai penerima mandat Rapat Anggota untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi. Pengurus dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pengetahuan dan lain-lain. Untuk mengetahui tingkat pendidikan pengurus KUD sampel dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Pengurus KUD Sampel Di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persen
a. SD	4	8,70
b. SLTP/SLTA	36	78,26
c. PT/S1	6	13,04
Jumlah	46	100

Sumber : Data Primer, diolah.

Tingkat pendidikan pengurus KUD dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok pertama tingkat pendidikan SD kelompok ke dua SMP/SLTA dan kelompok ketiga PT/S1.

Berdasarkan data tabel 4.6 di atas tampak bahwa sebagian besar pendidikan pengurus KUD sampel berada pada tingkat SLTP/SLTA yaitu sebanyak 36 orang atau 78,26 persen, yang berpendidikan PT/S1 sebanyak 6 orang atau 13,04 persen dan yang berpendidikan SD sebanyak 4 orang atau 8,70 persen.

Mengelola baik organisasi maupun usaha koperasi membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai terutama di bidang organisasi manajemen koperasi di bidang usaha atau kewirausahaan. Hal tersebut sangat penting karena koperasi adalah suatu organisasi yang terdiri

orang-orang dan untuk memimpin koperasi dimana berkumpul orang-orang yang memiliki karakteristik berbeda supaya dapat bersatu dan dapat melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing sesuai ketentuan dalam AD dan ART koperasi membutuhkan keterampilan dan kemampuan khusus dari setiap pengurus sehingga roda organisasi dapat berjalan dengan baik. Demikian juga karena koperasi sebagai badan usaha, supaya kegiatan usaha koperasi dapat berjalan dan mengalami peningkatan yang baik serta berkesinambungan. Maka dibutuhkan kemampuan kewirausahaan dari setiap pengurus koperasi. Berdasarkan data tentang tingkat pendidikan pengurus berada pada jenjang SLTP/SLTA dimana pelajaran tentang perkoperasian dianggap masih minimum, untuk itu diharapkan pengurus dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya dengan mempelajari lebih mendalam berbagai pengetahuan tentang koperasi baik dengan jalan usaha sendiri, dari membaca buku-buku tentang perkoperasian maupun dengan mengikuti pelatihan atau kursus di bidang perkoperasian. Untuk mengetahui keikutsertaan pengurus dalam mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan perkoperasian dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7 Pengurus KUD Sampel yang Pernah Mengikuti Pelatihan Tentang Perkoperasian Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000

Pelatihan Perkoperasian yang Pernah Diikuti Pengurus	Frekuensi	Persen
a. < 2 kali	30	65,22
b. 3 – 4 kali	13	28,26
c. > 5 kali	3	6,52
Jumlah	46	100

Sumber : Data Primer, 2000.

Berdasarkan data pada tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pengurus KUD sampel di kabupaten Bengkulu Utara yaitu 65,22 persen mengikuti pelatihan perkoperasian di bawah 2 kali, dan prosentase terkecil di bawah 5 kali sebesar 6,52 persen. Selain mengikuti pelatihan tentang perkoperasian, yang berperan juga dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengurus adalah pengalaman kerja, untuk mengetahui rata-rata tingkat pengalaman kerja pengurus KUD sampel di kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8 Pengalaman Kerja Sebagai Pengurus KUD Sampel di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000

Tingkat Pengalaman Pengurus KUD	Frekuensi	Persen
a. < 3 kali	15	32,61
b. 3 – 4 kali	25	54,35
c. > 4 kali	6	13,04
Jumlah	46	100

Sumber : Data Primer, diolah.

Tingkat pengalaman atau tingkat keseringan seseorang dipercayakan menjadi pengurus dapat menggambarkan tingkat kepercayaan anggota terhadap orang tersebut untuk menjadi pengurus, sedangkan tingkat kepercayaan dapat menggambarkan tingkat kemampuan seseorang. Seseorang dapat dipercayai karena terbukti dapat menjalankan tugas-tugas sebagai pengurus dengan baik.

Berdasarkan data pada tabel 4.8 di atas tampak bahwa sebagian besar pengurus yaitu 25 orang atau 54,35 persen memiliki tingkat pengalaman sebagai pengurus KUD antara 3 – 4 kali. Keadaan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa walaupun sebagian besar pengurus KUD

sampel memiliki tingkat pendidikan SLTP/SLTA dan sebagian besar mengikuti pelatihan perkoperasian di bawah 2 kali, tapi mereka memiliki pengalaman yang cukup atau sebagian besar antara 3 – 4 kali diangkat sebagai pengurus dalam menjalankan tugas mengelola organisasi dan usaha koperasi.

Kemampuan kinerja pengurus juga dipengaruhi oleh tingkat pemahamannya terhadap tugas dan kewajiban sebagai pengurus, artinya tidak mungkin seseorang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa memiliki tingkat pengetahuan yang benar terhadap tugas-tugas dan kewajiban yang telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pengurus koperasi. Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan tingkat kemampuan pengurus dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus KUD di Kabupaten Bengkulu Utara, dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9 Tingkat Pemahaman Terhadap Tugas Dan Kewajiban Sebagai Pengurus KUD Sampel di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000

Tingkat Pemahaman dan Kemampuan Melaksanakan Tugas dan Kewajiban	Frekuensi	Persen
a. Tidak	-	-
b. Sebagian saja	17	36,96
c. Seluruhnya dipahami dan mampu dilaksanakan	29	63,94
Jumlah	46	100

Sumber : Data Primer, diolah.

Berdasarkan data pada tabel 4.9 di atas tampak bahwa pengurus KUD sampel di Kabupaten Bengkulu Utara masih ada yang belum memahami tugas dan kewajiban secara keseluruhan (36,96 persen), hal itu dapat

disebabkan sebagian dari pengurus KUD tersebut masih baru dalam menjalankan tugas sebagai pengurus KUD, sebagaimana terlihat dalam tabel II.10 terdapat 32,81 persen yang pengalaman kerja dibawah tiga kali, artinya ada pengurus yang baru pertama kali diangkat sebagai pengurus KUD, sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang masih terbatas, hal tersebut juga yang dapat mempengaruhi sehingga pengaruh kinerja pengurus kecil terhadap keberhasilan usaha KUD. Selain pengurus yang memegang peranan penting dalam kehidupan koperasi adalah pengawas. Pengawas adalah salahsatu dari perangkat organisasi koperasi yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan atas jalannya kegiatan organisasi maupun usaha koperasi dan sebagai wakil dari seluruh anggota untuk melakukan pengawasan atau memonitoring atas jalannya kegiatan koperasi. Karena tugas pengawas membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus seperti pengetahuan tentang administrasi keuangan koperasi/akuntansi koperasi. Pengetahuan tentang auditing dan sebagainya. Untuk mengetahui tingkat pendidikan pengawas KUD sampel di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Tingkat Pendidikan Formal Pengawas KUD Sampel Di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000

Tingkat Pendidikan Formal Pengawas	Frekuensi	Persen
a. SD	3	13,04
b. SLTP/SLTA	16	69,57
c. PT/S1	4	17,39
Jumlah	34	100

Sumber : Data Primer, diolah.

Tingkat pendidikan pengawas KUD sampel di Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan pada tabel 4.10 di atas memperlihatkan sebagian besar yaitu 69,57 persen yang memiliki tingkat pendidikan SLTP/SLTA, yang memiliki tingkat pendidikan PT/S1 sebesar 17,39 persen dan prosentase terkecil yang berpendidikan SD yaitu 13,04 persen.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengetahuan dan keterampilan seseorang. Untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak semua orang memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama, itu disebabkan berbagai alasan yang tentunya tiap-tiap orang tidak selalu sama. Dalam kegiatan berkoperasi peranan pendidikan sebagaimana telah diteliti oleh berbagai pakar, seperti dikatakan dalam hasil penelitian prof. A. Kadir Suma mengatakan "Faktor pendidikan mempengaruhi partisipasi dan tingkat kemampuan baik sebagai anggota, pengurus, pengawas maupun manajer koperasi, pendidikan menambah tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang". (A. Kadir Suma, 1995 : 73).

Berbagai kendala yang dihadapi oleh banyak penduduk Indonesia terutama yang berada di daerah pedesaan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SLTA baru ada di ibukota kecamatan, pendidikan tinggi berada di tingkat Kabupaten/Kotamadya dan di tingkat propinsi, hal itu merupakan salah satu sebab di daerah pedesaan Kabupaten Bengkulu Utara ini sebagian besar penduduknya memiliki jenjang pendidikan yang rendah, yaitu sebagian besar di tingkat SD/MI seperti yang terdapat dalam tabel 4.10 di atas.

Dalam berkooperasi, kendala dari segi jenjang pendidikan formal yang dapat dialami oleh pengurus, pengawas dan anggota maupun manajer dan karyawan dapat diatasi dengan pendidikan non formal, seperti penataran, pelatihan, magang atau belajar sendiri dari berbagai literatur yang ada. Untuk mengetahui pengawas yang pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan tugas sebagai pengawas koperasi dapat dilihat dalam tabel 4.11 sebagai berikut ini :

Tabel 4.11 Tingkat Pelatihan Perkoperasian Yang Pernah Diikuti Pengawas KUD Sampel di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000

Tingkat Pelatihan	Frekuensi	Persen
a. < 2 kali	14	60,87
b. 3 – 4 kali	9	39,13
c. > 5 kali	-	-
Jumlah	23	100

Sumber : Data Primer, diolah.

Berdasarkan data pada tabel 4.11 di atas tampak bahwa pengawas KUD di kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar yaitu 60,87 persen yang mengikuti pelatihan perkoperasian di bawah 2 kali, sedangkan yang pernah mengikuti pelatihan antara 3 – 4 kali sebesar 39,13 persen. Untuk mengetahui tentang pengetahuan pengawas terhadap administrasi pembukuan/akuntansi koperasi dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini :

Tabel 4.12 Pengetahuan Pengawas KUD Sampel Tentang Administrasi Pembukuan KUD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000

Pengetahuan Tentang Administrasi Keuangan KUD/Akuntansi Koperasi	Frekuensi	Persen
a. Tidak diketahui	-	-
b. Hanya Sebagian	13	56,52
c. Diketahui semua	10	43,48
Jumlah	46	100

Sumber : Data Primer, diolah.

Pengetahuan mengawas KUD sampel terhadap administrasi pembukuan/akuntansi koperasi seperti terdapat pada tabel 4.12 di atas sebagian besar yaitu 56,52 persen menyatakan mengetahui hanya sebagian saja tentang administrasi KUD, yang mengetahui seluruhnya sebesar 43,48 persen dan tidak ada yang mengatakan tidak mengetahui secara keseluruhan. Untuk menjalankan tugas sebagai pengawas KUD, pengetahuan dan keterampilan tentang administrasi pembukuan memang mutlak untuk dimiliki oleh setiap pengawas, dengan demikian pengawas dapat menilai apakah tugas pengurus sudah sesuai dengan program yang ditetapkan atau tidak. Rendahnya tingkat pendidikan serta rendahnya frekuensi mengikuti penataran/pelatihan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan keterampilan pengawas dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pengujian data yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kecilnya pengaruh kinerja alat perlengkapan organisasi yaitu Rapat Anggota, pengurus dan pengawas terhadap keberhasilan usaha KUD menunjukkan bahwa kurang berfungsinya secara optimal alat perlengkapan organisasi koperasi sehingga kurang mendukung keberhasilan usaha KUD di kabupaten Bengkulu Utara.
2. Keberhasilan usaha KUD di kabupaten Bengkulu Utara, yang diukur dari persentase perkembangannya dari tahun 1998 ke tahun 1999 perkembangannya rendah, baik ditinjau dari perkembangan volume usaha, perputaran modal, rasio Rentabilitas Ekonomis dan Rentabilitas Modal Sendiri serta Profit Margin hasil yang dicapai juga rendah.
3. Pengurus koperasi pada umumnya berpendidikan formal tingkat pendidikan SLTP/SLTA, dengan pengalaman kerja sebagai pengurus hanya sedang. Hal ini salah satu akibat kurangnya pengurus mengikuti pelatihan pengurus KUD.
4. Pengawas bila ditinjau tingkat pendidikan formal sebagian besar memiliki pendidikan SLTA/SLTP dan sebagian kecil pengawas lulusan Perguruan Tinggi dan Pelatihan tentang pengawas juga kurang. Hal ini diikuti

pengetahuan pengawas tentang administrasi sebagian besar kurang sehingga hal ini berakibat kurangnya kinerja pengawas pada kegiatan usaha koperasi.

5.2. Saran

1. Alat perlengkapan KUD baik Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas sebaiknya dapat meningkatkan kemampuan melaksanakan fungsi dan manfaat secara optimal, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 tahun 1992 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD.
2. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kinerja alat perlengkapan organisasi KUD bagi pengurus dan pengawas penting sekali diupayakan melalui pelatihan baik *Off the job training* maupun *On the job training*.
3. Laporan keuangan KUD sebagian masih disusun berdasarkan prosedur/siklus akuntansi kurang sempurna. Karena itu, di masa yang akan datang perlu pelatihan di bidang akuntansi secara intensif dan kontinyu yang dilaksanakan oleh Kandeppok dan Dewan Koperasi Daerah kabupaten Bengkulu Utara sehingga pengelolaan keuangan KUD dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan khususnya PSAK 27 tentang Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Riyanto, 1991. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- BPS, *Bengkulu Utara Dalam Angka 1995, 1996 dan 1997*.
- Departemen Koperasi, 1984, *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Tap MPR No. IV/MPR/1999, Aneka Ilmu, Semarang.
- _____, Inpres 18 tahun 1998, *Tentang Peningkatan Pembinaan Dan Pengembangan Perkoperasian*, Jakarta.
- _____, 1992, *Dengan Koperasi Menuju Demokrasi Ekonomi*, Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Edisi ke-20, Jakarta.
- _____, 1998, *Pedoman dan Pembinaan KUD Mandiri*, Jakarta.
- _____, 1996, UU.RI No.25 tahun 1992 *Tentang Perkoperasian*, Ditjen Pembinaan Koperasi Perkotaan, Depkop & PPK, Jakarta.
- DEKOPIN, 1996, *Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Guna Mempersiapkan Koperasi Menghadap Abad XXI*, Jakarta.
- Edilius, 1994, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hendar dan Kusnadi, 1999, *Ekonomi Koperasi*, Lembaga Penerbit FE, UI, Jakarta.
- Harsono, 1985, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Koperasi di Kabupaten Malang*, Disertasi Doktor, UGM, Yogyakarta.
- Hendrayogi, 1985, *Koperasi, Masalah, Pengembangan dan Pembinaannya*, Lembaga Manajemen, FE, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hanel.A, 1985, *Basic Aspect of Cooperrative Organization and Policies for thier Promotion in Developing Countries*, Marburg, Bandung.
- _____, 1989, *Pokok-Pokok Pikiran mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangan di Negara-Negara Berkembang*. Edisi Pertama Universitas Padjadjaran.
- Herman Soewardi, 1985, *Menuju Kearah Pola Partisipasi Yang Ideal Dalam Koperasi, dalam Chaoirul Djamhuri (ED) Kearah Pengembangan Koperasi*, Departemen Koperasi.

- _____, 1985, *Koperasi Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan*. Dalam INFOKOP. Media Pengkajian Perkoperasian Indonesia Nomor 2 Tahun ke II.
- Kandepkop & PKM Kodia Palangka Raya, *Data Koperasi Unit Desa di Kotamadia Palangka Raya*, Palangka Raya.
- Kanwil Depkop dan PKM Prop. Kalteng, 1996, *Executive Sumary Rapat Kerja Nasional Departemen Koperasi dan PKK*, Palangka Raya.
- M. Sudrajat. SW, 1999, *Statistik Terapan*, Fakultas Pertanian Unpad, Jatinangor Bandung.
- Nanik Widiyanto, 1994, *Manajemen Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muslimin Nasution, 1987, *Strategi Menuju Keswadayaan Koperasi*, IKOPIN, Bandung.
- Ropke. J, 1989. *The Economic Theory of Cooperative Interprice*, Universitas Padjadjaran dan Marburg University.
- Rusidi, 1989, *Teladan Usulan Penelitian Dan Petunjuk Pengukuran Variabelnya serta Tabel Induk*, IKOPIN, Jatinangor Bandung.
- _____, 1993, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, UPT Penerbit IKOPIN, Jatinangor Bandung.
- Saksono, Prasetyo Budi, 1984, *Beberapa Masalah Organisasi Dan manajemen Koperasi, dalam Jurnal Koperasi Indonesia*, Kerjasama IKOPIN-Depkop, PIP dan DEKOPIN.
- Saleh Syafradji, 1998. *Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD)*, Tinjauan Studi Empiris, Jakarta.
- Sugianto, 1992. *Modal Sebagai Salah Satu Kendala bagi Perkembangan Koperasi*, IKOPIN Bandung.
- Sugiono, 1997, *Statistik Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.

**Lampiran 1 : Sampel KUD, Kecamatan, Alamat, Tahun Badan Hukum, Pengurus KUD
Di Kabupaten Bengkulu Utara 1999**

No.	Kecamatan / Nama Koperasi	Alamat	Badan Hukum		A*	B*	C*
			No.	Tanggal			
I	ARGA MAKMUR						
1	KUD Kemumu	Kemumu	090A	19/12/89	900	5	3
2	KUD Arma Jaya	Rama Agung	267B	25/9/90	253	5	3
II	PADANG JAYA						
3	KUD Panca Mukti Tama	Marga Sakti	185A	13/1/90	977	5	3
4	KUD Karya Mukti Wijaya	Tj. Harapan	191	20/7/86	418	5	3
III	KERKAP						
5	KUD Kerkap	Lubuk Durian	91	20/9/90	400	5	3
IV	LAIS						
6	KUD Eka Mulya	Batik Nau	498	13/2/82	546	5	3
7	KUD Makarti Mukti Tama	Paninjau	497	13/2/82	441	5	3
V	PONDOK KELAPA						
8	KUD Eko Utomo	Pek. Nyaring	437	11/4/91	702	5	3
9	KUD Balai Buntar	Sunda Kelapa	135A	8/10/80	892	5	3
VI	TABA PENANJUNG						
10	KUD Usaha Baru	T. Penanjung	113A	6/6/87	140	5	3
VII	TALANG EMPAT						
11	KUD Selupu Lama	K. Tinggi	297A	8/12/90	96	5	3
VIII	KETAHUN						
12	KUD Usaha Bersama	A. Sekamanah	666	6/11/90	1,0	5	3
13	KUD Mustika Jaya	G. Kencana	216	1/5/81	203	5	3
IX	PUTRI HIJAU						
14	KUD Lestari Jaya	Air Sabai	610	8/6/89	237	5	3
15	KUD Arga Mulya	K. Tengah	381	18/8/83	296	5	3
X	MUKO-MUKO SELATAN						
16	KUD Sukma	Arga Jaya	374	26/6/83	443	5	3
17	KUD Sido Muncul	Air Hitam	658	20/9/90	157	5	3
XI	MUKO-MUKO UTARA						
18	KUD Surya Ekonomi	Bumi Mulya	473	21/8/85	442	5	3
19	KUD Sido Mulya	Agung Jaya	659	20/9/90	414	5	3
20	KUD Marga Mulya	Selangan Jaya	680	4/3/91	307	5	3
21	KUD Bangun Tani	M. Jaya	659	23/3/88	393	5	3
22	KUD Makarti Mulya	S. Makmur	702	20/10/92	403	5	3
23	KUD Makarti Tani	Tj. Mulya	18	18/12/82	591	5	3

Sumber : Kandepkop Kabupaten Bengkulu Utara, diolah

Keterangan : A* = jumlah anggota, B* = jumlah pengurus, C* = jumlah pengawas

Lampiran 2 : Keadaan Modal KUD Sampel di Kabupaten Bengkulu Utara 1998 - 1999

No.	Nama Koperasi	Modal (Rp)		Rata-rata
		1998	1999	
1	KUD Kemumu	738,458,800	780,563,200	759,511,000
2	KUD Arma Jaya	68,023,400	64,988,500	66,505,950
3	KUD Panca Mukti Tama	117,153,661	113,888,200	115,520,931
4	KUD Karya Mukti Wijaya	57,771,300	43,543,900	50,657,600
5	KUD Kerkap	71,243,300	70,352,200	70,797,750
6	KUD Eka Mulya	88,172,100	81,462,300	84,817,200
7	KUD Makarti Mukti Tama	187,180,300	178,474,700	182,827,500
8	KUD Eko Utomo	33,411,100	41,922,300	37,666,700
9	KUD Balai Buntar	122,947,000	89,416,300	106,181,650
10	KUD Usaha Baru	34,610,000	36,195,000	35,402,500
11	KUD Selupu Lama	33,927,500	40,846,900	37,387,200
12	KUD Usaha Bersama	110,686,500	182,216,800	146,451,650
13	KUD Mustika Jaya	29,360,000	46,220,700	37,790,350
14	KUD Lestari Jaya	44,700,000	35,879,000	40,289,500
15	KUD Arga Mulya	7,850,000	30,970,200	19,410,100
16	KUD Sukma	58,493,900	63,037,700	60,765,800
17	KUD Sido Muncul	39,053,600	37,470,200	38,261,900
18	KUD Surya Ekonomi	7,030,000	10,680,100	8,855,050
19	KUD Sido Mulya	68,103,300	61,110,200	64,606,750
20	KUD Marga Mulya	54,689,400	50,372,200	52,530,800
21	KUD Bangun Tani	35,272,400	37,716,300	36,494,350
22	KUD Makarti Mulya	86,430,100	82,220,300	84,325,200
23	KUD Makarti Tani	52,602,900	54,755,600	53,679,250
	Jumlah	2,147,170,561	2,234,302,800	2,190,736,681

Sumber : Kandepkop dan PPK Kabupaten Bengkulu Utara, diolah

**Lampiran 3 : Keadaan Volume Usaha Bersih KUD Sampel di Kabupaten
Bengkulu Utara tahun 1998 - 1999**

No.	Nama Koperasi	Volume Usaha (Rp)		Rata-rata
		1998	1999	
1	KUD Kemumu	412,350,000	371,598,200	391,974,100
2	KUD Arma Jaya	179,424,600	216,553,000	197,988,800
3	KUD Panca Mukti Tama	222,744,900	280,340,000	251,542,450
4	KUD Karya Mukti Wijaya	39,886,000	50,310,700	45,098,350
5	KUD Kerkap	34,100,400	28,740,000	31,420,200
6	KUD Eka Mulya	200,300,000	160,300,000	180,300,000
7	KUD Makarti Mukti Tama	183,850,000	195,400,000	189,625,000
8	KUD Eko Utomo	35,068,200	52,650,700	43,859,450
9	KUD Balai Buntar	75,236,000	58,400,000	66,818,000
10	KUD Usaha Baru	20,475,000	27,094,400	23,784,700
11	KUD Selupu Lama	5,716,000	30,939,300	18,327,650
12	KUD Usaha Bersama	427,663,600	460,924,300	444,293,950
13	KUD Mustika Jaya	31,400,000	34,510,000	32,955,000
14	KUD Lestari Jaya	18,300,000	21,210,200	19,755,100
15	KUD Arga Mulya	23,400,000	61,933,000	42,666,500
16	KUD Sukma	79,233,300	71,425,600	75,329,450
17	KUD Sido Muncul	67,719,500	70,300,300	69,009,900
18	KUD Surya Ekonomi	24,225,700	36,500,000	30,362,850
19	KUD Sido Mulya	17,360,000	26,310,500	21,835,250
20	KUD Marga Mulya	25,381,500	38,572,000	31,976,750
21	KUD Bangun Tani	23,400,000	38,850,000	31,125,000
22	KUD Makarti Mulya	76,497,100	79,731,600	78,114,350
23	KUD Makarti Tani	32,500,000	54,220,000	43,360,000
	Jumlah	2,256,231,800	2,466,813,800	2,361,522,800

Sumber : Kandepkop dan PPK Kabupaten Bengkulu Utara, diolah

**Lampiran 4 : Keadaan Kemampuan Usaha Dalam Rentabilitas Ekonomis (RE)
dan Rentabilitas Modal Sendiri (RMS) KUD Sampel di Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 1998 - 1999**

No.	Nama Koperasi	R.E (%)			RMS (%)			R (*)
		98	99	x	98	99	x	x
1	KUD Kemumu	5.12	4.54	4.83	9.20	7.58	8.39	6.61
2	KUD Arma Jaya	1.51	5.96	3.74	4.19	16.66	10.43	7.08
3	KUD Panca Mukti Tama	19.23	21.95	20.59	44.83	48.67	46.75	33.67
4	KUD Karya Mukti Wijaya	0.39	5.76	3.08	0.88	17.82	9.35	6.21
5	KUD Kerkap	1.62	1.72	1.67	3.65	3.96	3.81	2.74
6	KUD Eka Mulya	11.02	6.87	8.95	19.91	11.62	15.77	12.36
7	KUD Makarti Mukti Tama	8.27	9.74	9.01	12.52	14.94	13.73	11.37
8	KUD Eko Utomo	2.49	6.69	4.59	3.33	10.38	6.86	5.72
9	KUD Balai Buntar	2.61	1.63	2.12	5.48	2.77	4.13	3.12
10	KUD Usaha Baru	0.87	8.99	4.93	2.79	21.36	12.08	8.50
11	KUD Selupu Lama	1.95	8.86	5.41	1.10	22.94	12.02	8.71
12	KUD Usaha Bersama	3.66	25.62	14.64	57.46	76.60	67.03	40.84
13	KUD Mustika Jaya	5.82	5.52	5.67	10.23	14.78	12.51	9.09
14	KUD Lestari Jaya	3.32	6.09	4.71	5.99	9.73	7.86	6.28
15	KUD Arga Mulya	12.42	14.60	13.51	16.99	16.21	16.60	15.06
16	KUD Sukma	4.93	2.89	3.91	9.13	5.62	7.38	5.64
17	KUD Sido Muncul	5.78	8.28	7.03	7.73	10.24	8.99	8.01
18	KUD Surya Ekonomi	8.12	9.90	9.01	23.77	30.59	27.18	18.10
19	KUD Sido Mulya	3.84	4.18	4.01	6.41	6.35	6.38	5.20
20	KUD Marga Mulya	2.81	4.91	3.86	3.82	5.80	4.81	4.34
21	KUD Bangun Tani	6.80	1.10	3.95	12.20	11.76	11.98	7.97
22	KUD Makarti Mulya	5.05	0.76	2.91	11.96	17.81	14.89	8.90
23	KUD Makarti Tani	3.48	6.71	5.10	4.80	9.11	6.96	6.03
	Jumlah	121.11	173.27	147.19	278.37	393.30	335.84	241.51

Sumber : Kandepkop dan PPK Kabupaten Bengkulu Utara, diolah